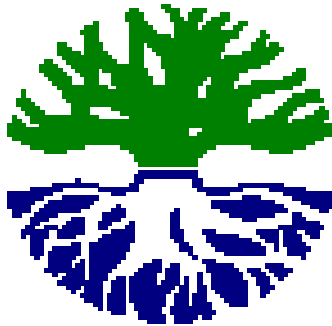
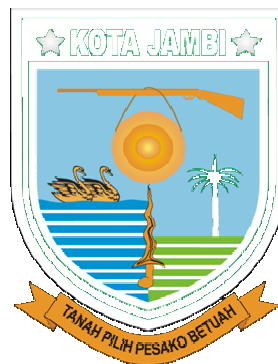


**STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
KOTA JAMBI
Tahun 2007**



**Diterbitkan : Nopember 2007
Data : Oktober 2006 – Oktober 2007**



PEMERINTAH KOTA JAMBI

**BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH
(BAPEDALDA) KOTA JAMBI**

Alamat : Jl. Basuki Rahmat No. 08 Kotabaru
Jambi – 36128
Telp : (0741) 444015
Fax : (0741) 40032
E-mail : -
Website : -

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Tujuan penulisan laporan	1
B. Visi dan Misi Provinsi/Kabupaten/Kota	2
C. Gambaran Umum	4
1, Kondisi Georai.Demografi,Geologi,Tata Ruang, Kependuduk an Dan Kesehatan Masyaraka.....	4
2. Kebijakan Pendaan Lingkungan,Sosial,Ekonomo Dan Budaya Didaear Dalam Rangka Melaksanakan Pembangunan Yang Berkelanjutan Dan Berwawasan Lingkungan Hidup.....	14
BAB II ISI LINGKUNGAN HIDUP UTAMA	27
A. Metode Penyusunan.....	29
B. Masalah Sosial	35
BAB III A I R	
A.Kondisi Kuantitas Dan Kualitas Air.....	39
B Tekanan Terhadap Kuantitas Dan Kualitas Air.....	41
C. Pengelolaan Sumber Daya Air.....	41
BAB IV UDARA.....	51
Kualitas Udara Kota Jambi.....	51
BAB V KEANEKARAGAMAN HAYATI	56

A. Kodisi Keanekaragaman Hayati.....	58
B. Ancaman Keanekaragaman Hayati.....	58
C. Pengelolaan Dan Konservasi Kodisi Keanekaragaman Hayati...	64
BAB VI REKOMENDASI TINDAK LANJUT	69

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Iklim Rata-rata Kota Jambi Tahun 2002 s/d 2007.....	6
1.2 Beberapa Kawasan Konservasi di Kota Jambi.....	9
1.3 Luas Lahan Terbuka di Kota Jambi	10
1.4 Data Kondisi Hutan Kota Yang di Kelola Oleh Kantor Kehutanan Kota Jambi	12
1.5 Luas Wilayah Penduduk Dan Kepadatan Kepadatan Tahun Menurut Kecamatan Tahun 2006	13
1.6 Anggaran Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Jambi	17
1.7 Jumlah Personil Menurut Tingkat Pendidikan	18
1.8 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kota Jambi (Atas Dasar Harga Konstan 2000) Tahun 2006	22
1.9 Produk Domestik Regional Bruto Kota Jambi	23
1.10 Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Menurut Lapangan Usaha (Harga Konstan) Kota Jambi Tahun 2003 – 2005	24
3.1 Perbandingan Hasil Pemeriksaan Kualitas Air Sungai Batanghari Di Kota Jambi Oktober 2006 – Oktober 2007.....	40
3.2 Panjang Drainase Dan Keadaan Tahun 2002 – 2006	46
4.1 Sarana Transportasi Darat di Kota Jambi Tahun 2001 – 2006	51
4.2 Rekapitulasi Indeks Standar Pencemaran Udara Kota Jambi 01 Nopember 2006 s/d Oktober 2007	54
4.3 Perkembangan 10 Jenis Penyakit Terbesar di Kota Jambi	55
5.1 Luas Hutan Kota Jambi Tahun 2007	58
5.2 Luasan beberapa Ekosistem Lahan Basah di Indonesia	59
5.3 Populasi Gajah di Kawasan Ekosistem Leuser	60

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya jua maka kami menyelesaikan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) tahun 2007 ini. Buku laporan SLHD ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang kualitas lingkungan hidup daerah Kota Jambi selama 1 (satu) tahun kebelakang, dengan harapan dapat memberikan arahan dalam menindaklanjuti perkembangan lingkungan hidup yang mempunyai dampak terhadap masyarakat dan makhluk hidup lainnya yang tidak lepas dari perkembangan pembangunan yang bernuansa lingkungan.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan menyelesaikan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) tahun 2007 ini terdapat kekurangan-kekurangan, hal ini dikarenakan keterbatasan kami. Oleh karena itu kami senantiasa mengharapkan kritik dan saran yang bersifat konsturktif dalam penyempurnaan penyusunan SLHD ini. Pada kesempatan ini juga kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan/pembuatan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) tahun 2007 ini.

Demikianlah, semoga buku ini dapat bermanfaat bagi Pemerintah Kota Jambi, Stakeholder pelaku pembangunan dan pihak-pihak yang memerlukan. Terima kasih.

Jambi, Nopember 2007

KEPALA BAPEDALDA KOTA JAMBI

Drs.H.RUSLI.K.SIREGAR.M.Si.

Pembina Tk.I.

NIP. 430 008 015

BAB I

PENDAHULUAN

A. TUJUAN PENULISAN LAPORAN

Dalam upaya memulihkan Kualitas Lingkungan yang semakin menurun di Kota Jambi ini sudah barang tentu membutuhkan analisis yang mendalam terhadap setiap proses pengambilan keputusan bagi kegiatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Salah satu piranti (alat yang dapat membantu setiap proses pengambilan keputusan tersebut adalah dengan membuat/menyusun Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SoER) Kota Jambi. Adapun tujuan dari penyusunan laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan data informasi dan dokumentasi untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan pada semua tingkat dengan memperhatikan aspek daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup Daerah.
2. Meningkatkan mutu informasi tentang lingkungan hidup sebagai bagian dari sistim pelaporan publik serta sebagai bentuk dari akuntabilitas publik.
3. Menyediakan sumber informasi utama bagi Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (Repetada), Program Pembangunan Daerah (Propeda) dan kepentingan penanaman modal (investor).
4. Menyediakan informasi lingkungan hidup sebagai sarana publik untuk melakukan pengawasan dan penilaian pelaksanaan Tata Praja Lingkungan (Good Environmental Governence) didaerah serta sebagai landasan publik untuk berperan dalam menentukan kebijakan pembangunan berkelanjutan bersama-sama dengan lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif.
5. Memberikan bahan dasar penetapan kebijakan daerah dalam pengelolaan lingkungan di masa yang akan datang berdasarkan target prioritas yang disepakati bersama.

Dengan mengetahui bahwa perubahan lingkungan terjadi sepanjang waktu, maka pemantauan berkala akan merupakan suatu titik awal bagi

pembaharuan kecenderungan dan kondisi secara periodik di Kota Jambi, oleh karena itu dengan adanya laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) ini diharapkan dari berbagai pihak dapat memberikan masukan atau saran untuk memperbaiki kondisi lingkungan di Kota Jambi.

B. VISI DAN MISI KOTA JAMBI



Dampak dari pembangunan sebagai usaha sadar untuk merubah dari suatu kondisi tertentu menuju kondisi yang lebih baik, dilaksanakan atas dasar potensi sumber daya yang dimiliki. Namun kondisi ini sangat dipengaruhi oleh situasi sosial budaya, ekonomi dan politik.

Kota Jambi sebagai Ibukota Provinsi dan tempat terkonsentrasinya penduduk serta kegiatan ekonomi, memiliki tantangan yang sangat besar untuk masa akan datang. Daya saing yang kuat untuk tumbuh dan berkembang secara bersama-sama dengan perkembangan wilayah sekitarnya merupakan salah satu tantangan yang dihadapi, disamping menghadapi situasi global menyebabkan Kota Jambi harus berpacu membangun wilayahnya seiring dengan pertumbuhan penduduk dan dinamika pembangunan ekonomi daerah, regional maupun nasional.

Dalam konstelasi regional dan strategi pembangunan wilayah Propinsi Jambi, Kota Jambi merupakan Pusat Pengembangan Wilayah Pembangunan “B” yang diarahkan sebagai kawasan interaksi antara kegiatan ekonomi lokal dan regional dengan kegiatan ekonomi global. Mengacu pada rencana tersebut, serta memperhatikan kondisi dan potensi yang dimiliki, Pemerintah Kota Jambi bersama dengan seluruh komponen masyarakat serta *stakeholder* berupaya mewujudkan Kota Jambi menjadi daerah otonom melalui pernyataan Visi Pembangunan Kota Jambi yaitu **“Terwujudnya Kota Jambi sebagai simpul pelayanan regional terutama dalam agribisnis dan sebagai wilayah komplemen utama terhadap pusat pertumbuhan regional Sumatera tahun 2015”**.

Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka dilaksanakan melalui **Misi Pembangunan Kota Jambi**, yaitu sebagai berikut:

1. Mewujudkan sumberdaya manusia yang memiliki integritas moral, kemampuan intelektual, dan ketrampilan profesional.
2. Mengembangkan kawasan perdagangan, jasa dan industri yang mampu menciptakan keterkaitan erat dengan wilayah melalui kerja sama baik regional maupun global yang saling menguntungkan yang berbasis pada ekonomi kerakyatan.
3. Menciptakan sistem jaringan transportasi dan komunikasi yang efektif, efisien dan dinamis serta terpadu dengan mengembangkan simpel-simpel jasa sarana dan prasarana yang terinterkoneksi dan saling mendukung, serasi untuk memenuhi kebutuhan internal dan eksternal kota.
4. Menciptakan Kota Jambi menjadi kota yang bersih, aman dan tertib serta estetik melalui pendekatan kota hutan tropis yang ramah lingkungan dan mendukung bagi berkembangnya sosial budaya dan ekonomi masyarakat.

C. GAMBARAN UMUM



1. Kondisi Geografi, Demografi, Geologi, Tata Ruang, Kependudukan Dan Kesehatan Masyarakat

Kota Jambi terletak di bagian Barat cekungan Sumatera Selatan yang disebut Sub Cekungan Jambi, yang merupakan dataran rendah Sumatera Timur, karena itu topografinya bercirikan dataran. Dataran wilayah Kota Jambi berdasarkan ketinggian dari permukaan laut berada antara 0 – 40 meter. Dari kategori ketinggian tersebut, dapat dikemukakan seluruh wilayah Kota Jambi merupakan wilayah dataran rendah. Posisi demikian perlu dicermati dalam pembangunan sarana dan prasarana kota kedepan agar semua fasilitas umum berfungsi secara optimal.

Kota Jambi sebagai pusat administrasi pemerintah Propinsi Jambi berada pada bagian Timur dan Tengah Sumatera, secara astronomik terletak antara $01^{\circ} 30' 2,98''$ – $01^{\circ} 40' 1,07''$ Lintang Selatan dan $103^{\circ} 40' 1,67''$ – $103^{\circ} 40' 0,22''$ Bujur Timur, yang dikelilingi oleh Kabupaten Muaro Jambi.

Secara administrasi wilayah Kota Jambi berbatasan langsung dengan daerah di sekitarnya yaitu sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi.
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi.
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Kec. Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi.
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kecamatan Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi.

Geografi wilayah kota Jambi secara keseluruhan terdiri atas daratan dengan luas 20.538 ha atau 205,38 Km². Topografi wilayah kota Jambi terdiri dari 11.326 Ha dataran (0-2%), 8.081 Ha bergelombang (2-15%), dan 41 Ha sedikit curam (15-40%). Daerah bergelombang terdapat di sebelah Selatan dan Utara, sedangkan daerah rawa terdapat di sekitar aliran sungai Batang Hari. Sungai ini membelah wilayah Kota Jambi menjadi dua bagian, yaitu Utara dan Selatan. Kedua sisi ini kondisinya berbeda, pada musim tertentu wilayah Utara dan beberapa wilayah yang rendah tergenang air sungai yang pasang naik. Sedangkan daerah resapan air (Aerose) di Kota Jambi adalah 1.187,5 Ha atau 5,78% dari luas wilayah Kota Jambi.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (Perda) Nomor 6 Tahun 1986 Kota Jambi terdiri dari 8 (delapan) Kecamatan dan 55 Kelurahan. Kemudian, berdasarkan Perda Kota Jambi Nomor 35 Tahun 2002, terjadi penambahan 7 (tujuh) buah kelurahan dengan demikian jumlah Kelurahan di Kota Jambi menjadi 62 Kelurahan.

Kota Jambi termasuk beriklim tropis, dimana musim hujan jatuh pada bulan Oktober sampai April (dipengaruhi oleh Musim Timur Selatan) dan musim kemarau pada bulan April sampai Oktober (dipengaruhi oleh Musim Barat). Keadaan iklim rata-rata Kota Jambi dalam kurun waktu tahun 2001 – 2006 terlihat cukup berfluktuasi. Suhu rata-rata 26,75 °C Kelembaban udara rata-rata 83,56% ,dengan Curah hujan rata-rata 177,80 mm/tahun. Sedangkan kecepatan angin rata-rata sebesar 7,84 knot.

Tabel 1.1 Iklim Rata-rata Kota Jambi Tahun 2002 s.d 2007

No.	Iklim	Kisaran Rata-rata					Satuan
		2003	2004	2005	2006	2007	
1	Suhu	26,80	26,70	26,67	26,70	-	°C
2	Kelembaban Udara	83,50	84,25	84,00	82,70	-	%
3	Curah Hujan	189,25	185,58	196,00	174,67	-	mm/th
4	Kecepatan Angin	11,00	8,00	8,00	5,20	-	Knot

Sumber: BMG Kota Jambi 2007

Masalah pemanfaatan ruang merupakan masalah krusial di Kota Jambi, karena fungsi Kota Jambi tidak hanya sebagai kota yang berupaya memberikan pelayanan kepada warganya, tetapi juga sebagai pusat ibukota Provinsi Jambi. Karena itu, dengan mempertimbangkan kondisi yang ada, dan kecenderungan yang berkembang, maka pemanfaatan ruang harus dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan eksternal maupun internal.

Dalam beberapa tahun terakhir, sarana fisik Kota Jambi telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Pusat-pusat perbelanjaan / pusat-pusat perniagaan (*shopping-mall*) bermunculan di beberapa lokasi yang menjadi pusat berkumpul masyarakat. Perubahan kota juga dirasakan dengan pembangunan Jembatan Makalam dan Jembatan Batanghari II di wilayah pinggiran kota yang merupakan koridor penyangga perluasan (*sprawl*) Kota Jambi. Perubahan sudah terasa di awal tahun 2000-an hal ini terlihat dengan adanya kecenderungan pembangunan gedung-gedung di sekitar *Ring-Road* dengan tingkat hunian yang cukup tinggi.

Secara penataan ruang, wilayah Kota Jambi dibagi ke dalam beberapa fungsi ruang yang meliputi kawasan hutan, kawasan pemukiman, kawasan industri, kawasan perusahaan dan jasa, kawasan perhubungan, areal sawah, areal kebun/tegalan, areal pekarangan, areal kebun campur/semak belukar, kawasan sungai/danau/rawa, kawasan kumuh perkotaan, lahan produktif, dan lahan kritis.

Kebijaksanaan pembangunan penataan ruang diharapkan pada :

1. Penataan ruang daerah dilakukan dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang Provinsi Jambi yang terpadu, serasi dan optimal sesuai dengan kebutuhan dan daya dukung lingkungan menuju pembangunan yang berkelanjutan.
2. Tersusunnya rencana detail tata ruang untuk kawasan dengan tingkat pertumbuhan cepat, dan pusat perkotaan.
3. Penyebar luasan dan sosialisasi rencana tata ruang wilayah maupun rancangan detail tata ruang.
4. Terwujudnya konsistensi pelaksanaan pembangunan dengan rencana tata ruang.
5. Penerapan pendekatan ekoregion dalam penentuan blok pemanfaatan ruang.

Pemanfaatan ruang Kota Jambi ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 05 Tahun 2002 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi Tahun 2000-2010. Dengan pertimbangan dinamika penduduk dan kegiatan perekonomian dan untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat di seluruh kota, maka Kota Jambi dibagi ke dalam tujuh Bagian Wilayah Kota (BWK). Masing-masing BWK dilayani oleh satu pusat BWK dan setiap BWK didukung oleh beberapa Sub BWK dan Unit lingkungan permukiman penduduk, dimana setiap unit dilayani oleh beberapa pusat sesuai dengan skala pelayanan masing-masing. Tujuh BWK yang ada di Kota Jambi adalah sebagai berikut :

a. BWK A

Terletak di bagian Utara Kota Jambi meliputi wilayah Kecamatan Danau Teluk dan Kecamatan Pelayangan. Pemanfaatan lahan untuk pemukiman, pendidikan, kebudayaan, ruang terbuka hijau, konservasi, dengan luas wilayah 3.234 Ha.

b. BWK B

Terletak di bagian Utara Kota Jambi meliputi wilayah Kecamatan Kota Baru dan sebagian Kecamatan Jelutung. Pemanfaatan lahan untuk pemukiman, perkantoran/pemerintahan (kota), perdagangan, kawasan pompa minyak, cadangan pengembangan kota, TPA, perdagangan kering dan industri luas, dengan luas wilayah 3.307 Ha.

c. BWK C1

Terletak di wilayah Kecamatan Telanaipura. Pemanfaatan lahan untuk perkantoran (propinsi), pemukiman, pendidikan, perdagangan dan jasa, rumah sakit, ruang terbuka hijau, hutan kota, dengan luas 2.883 Ha.

d. BWK C2

Terletak di sebagian wilayah Kecamatan Telanaipura dan sebagian wilayah Kecamatan Kotabaru. Pemanfaatan lahan untuk pemukiman, perdagangan, kawasan pompa minyak, konservasi, cadangan pengembangan kota, dengan luas wilayah 5.401 Ha.

e. BWK D1

Terletak di sebagian wilayah Kecamatan Jambi Timur. Pemanfaatan untuk ruang terbuka hijau, konservasi, industri dan pergudangan, rawa, dengan luas wilayah 1.669 Ha.

f. BWK D2

Terletak di sebagian wilayah Kecamatan Jambi Selatan dan sebagian wilayah Kecamatan Jambi Timur. Pemanfaatan lahan untuk industri dan pergudangan, bandar udara, taman rimba, ruang terbuka hijau, cadangan pengembangan kota, dengan luas wilayah 2.207 Ha.

g. BWK E

Terletak di wilayah Kecamatan Pasar Jambi, sebagian wilayah Kecamatan Telanaipura, Jelutung, Jambi Timur, dan Jambi Selatan. Pemanfaatan lahan untuk pemukiman, perdagangan dan jasa, dengan luas wilayah 18.837 Ha.

Tabel 1.2 Beberapa Kawasan Konservasi di Kota Jambi

No	Objek	Lokasi	Luas Areal (Ha)	Jarak dari CBD
1	Danau Sipin	Kec. Telanaipura <i>Kel. Buluran Kenali, Sungai Putri & Legok</i> (BWK C1)	200	± 3 Km
2	Danau Kenali	Kec. Telanaipura <i>Kel. Kenali Asam Bawah</i> <i>(Jl. Ismail Malik)</i> (BWK C1)	317,49	± 7 Km
3	Danau Teluk	Kec. Danau Teluk <i>Kel. Olak Kemang (Jl. K.H. Hasan Anang)</i> (BWK A)	193,12	± 12 Km
4	Hutan Rengas Teluk Kenali	Kec. Telanaipura <i>Kel. Buluran Kenali (Jl. K.H.A. Majid Jambi)</i> (BWK C1)	54,77	± 7 Km
5	Hutan Kota	Kec. Kota Baru <i>Kel. Kenali Asam Bawah</i> <i>(Jl. Ismail Malik)</i> (BWK C2)	11	± 7 Km
6	Hutan Pinus	Kec. Kota Baru <i>Kel. Kenali Asam Bawah</i> <i>(Jl. Pangeran Hidayat - Paal X)</i> (BWK C2)	10	± 15 Km
7	Taman Remaja	Kec. Jelutung <i>Kel. Handil Jaya (Jl. H. Agus Salim)</i> (BWK C2)	2,24	± 3 Km
8	Taman Rimba Jambi	Kec. Jambi Selatan <i>Kel. The Hok (Jl. Kol. Udara Sunaryo)</i> (BWK D2)	10	± 7 Km
10	Taman Anggrek	Kec. Telanaipura <i>Kel. Telanaipura (Jl. Jend. A. Yani)</i> (BWK C1)	2,25	± 5 Km

Sumber : Bappeda (Monografi Kota Jambi) 2006

Tabel 1.3 Luas Lahan terbuka di Kota Jambi Tahun 2006

No.	Uraian	Luas (Ha)	Prosentase
1	Badan Air	1.500	7,30
2	Kawasan lindung setempat	340	1,66
3	Lahan pengembangan terbatas	260	1,27
4	Lahan potensi dengan pembatas	3.720	18,11
5	Genangan musiman	14.718	71,66
	Jumlah	20.538	100,00

Sumber: Bappeda (Monografi Kota Jambi) 2006

Perkembangan kota yang cenderung memusat menyebabkan kurang efisiennya berbagai sarana dan prasarana dasar yang telah dibangun dipusat kota terasa kurang memadai, sedangkan yang dibangun pada bagian pinggiran kurang termanfaatkan. Selain itu, kota sebagai tempat pertumbuhan berbagai industri, merupakan peluang untuk merebut kesempatan kerja, namun yang diharapkan tidak sesuai dengan kenyataan. Akibatnya urbanisasi meningkat, taraf hidup masyarakat rendah, tingkat pendidikan terbatas, penghasilan masyarakat rendah, yang akhirnya terjadi permukiman kumuh dan menyebabkan penataan lingkungan sehat sulit dicapai.

Arah kebijakan pembangunan dibidang tata ruang antara lain:

1. Mendorong keterpaduan dan koordinasi antar instansi terkait dalam penegakan pelaksanaan tata ruang.
2. Mensosialisasikan peraturan-peraturan dan peningkatan pemahaman masyarakat dan aparat terhadap penataan ruang.
3. Meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam penataan kota yang aman, tertib, indah dan sehat.
4. Meningkatkan fasilitas umum di lingkungan permukiman dan meningkatkan pengawasan mengenai penyediaan perumahan dan permukiman.
5. Meningkatkan kualitas SDM, sarana dan prasarana serta penggunaan teknologi pemadam kebakaran, dan

6. Meningkatkan cakupan air minum untuk perumahan penduduk.

Berdasarkan kebijakan tersebut diatas, maka program penataan ruang daerah Kota Jambi adalah sebagai berikut :

1. Program percepatan pengembangan wilayah
2. Program peningkatan koordinasi pembangunan
3. Program memperkokoh basis pembangunan daerah
4. Program pemantapan fungsi perkotaan
5. Program peningkatan kualitas aparat, dan
6. Program peningkatan kesadaran masyarakat

Untuk menjaga keseimbangan lingkungan dan keindahan kota, penataan ruang terbuka hijau dan daerah konservasi telah ditata sedemikian rupa. Namun demikian, di sepanjang jalan arteri dan daerah perkantoran yang ada dalam Kota Jambi seperti di pusat perkantoran Pemerintah Daerah Provinsi Jambi di Kecamatan Telanaipura, dan pusat perkantoran Pemerintah Daerah Kota Jambi di Kecamatan Kota Baru dan beberapa wilayah lainnya juga dilakukan penanaman pohon pelindung/penghijauan.

Sementara itu, lahan kosong yang ada dipinggir jalan arteri, juga dilakukan pemanfaatan dengan memberikan izin kepada pengusaha/penjual bunga (*nursery*) untuk mengembangkan usahanya sehingga lahan kosong tersebut termanfaatkan dengan baik dan disamping menambah pendapatan masyarakat, juga menambah keindahan kota.

Selain daripada itu, pengembangan hutan kota di Kota Jambi terus dioptimalkan, karena hutan kota telah diklaim sebagai paru-paru kota, yang mampu menyerap dan menetralkan zat-zat beracun seperti karbon monoksida (CO), Karbon dioksida (CO₂), gas Nitrogen, debu timbal asap kendaraan bermotor dan menormalkan panas bumi. Secara alami, hutan mempersembahkan zat kehidupan Oksigen (O₂) dan menjaga iklim mikro serta menciptakan kenyamanan dan keseimbangan lingkungan hidup, baik manusia, satwa maupun kehidupan jasad relik lainnya. Pengembangan hutan kota tersebut diharapkan nantinya tidak hanya sebagai tempat konservasi, tetapi dapat pula sebagai tempat rekreasi, pengembangan studi, perkemahan dan lain sebagainya.

Tabel: 1.4 Data Kondisi Hutan Kota yang di Kelola oleh Kantor Kehutanan Kota Jambi

No.	Uraian	Jumlah		Satuan	Keterangan
		Th. 2005	Th. 2006		
1.	Luas	10	10	Hektar	
2.	Jalan Setapak	2.686	2.686	Meter	Penambahan jalan setapak 1.029 meter
3.	Embung/Kolam Serbaguna	1	1	Unit	Dibuat TA 2004, Ditabur benih ikan TA 2005
4.	Pagar Kawat Tiang Kayu	1.299	1.299	Meter	berbatasan dengan Perumahan Mutiara Hijau.
5.	Kondisi Tumbuhan	70	70	%	Sebagian besar Pohon Karet Tua
6.	Lokasi Kemah di sekitar Pendopo	Belum ada	Telah dibuat		TA 2005
7.	Lokasi Saung/Kemah di sekitar embung	Belum ada	Telah dibuat		TA 2005 realisasi ± 50 %
8.	Ruang Terbuka Hijau di dekat embung/kolam	Belum ada	Telah dibuat		TA 2005 realisasi ± 50 %
9.	WC di dekat Pendopo	Belum ada	Telah dibuat		TA 2005 realisasi 2 pintu
10.	Pintu pagar besi (di pintu belakang)	Belum ada	Telah dibuat		TA 2005
11.	Inventarisasi Jenis dan Pelabelan Tanaman	Belum ada	Telah dilakukan		TA 2005
12.	Rancangan Pengembangan Hutan Kota	Belum ada	Telah dibuat		TA 2005

Sumber : Kantor Kehutanan Kota Jambi, 2006

Kebijakan Pemerintah Kota Jambi diprioritaskan kepada peningkatan utilitas kota sebagai pendorong untuk tumbuh dan berkembangnya ekonomi Kota Jambi, bidang sosial budaya dan bidang fisik prasarana yang berwawasan lingkungan.

Masalah-masalah perkotaan, seperti kepadatan lalu lintas, pencemaran udara, perumahan dan pelayanan masyarakat yang kurang layak, kriminal, kekerasan dan penggunaan obat-obat terlarang menjadi masalah yang digeluti oleh masyarakat perkotaan. Melihat perkembangan fakta tersebut, lingkungan fisik, sosial dan budaya perkotaan berada pada situasi yang rawan. Apabila kecenderungan tersebut tidak dikendalikan, maka ketahanan daya dukung daerah perkotaan akan lemah.

Upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas lingkungan fisik dan sosial secara terus menerus dengan memberdayakan masyarakat perkotaan, diharapkan dapat menciptakan kondisi yang mengarah kepada pencapaian kota idaman atau kota sehat yang memberikan keamanan, kenyamanan, ketenteraman dan kesehatan bagi masyarakat perkotaan dalam menjalankan kegiatan kehidupannya.

Perhatian untuk meningkatkan kualitas lingkungan kehidupan baik di kota maupun wilayah Kabupaten merupakan prioritas dalam Agenda 21. Hal tersebut dapat dipahami mengingat pertumbuhan penduduk kota di dunia menunjukkan lonjakan yang cukup fenomenal, sementara sumber daya alam dan kualitas lingkungan cenderung menurun.

Semakin pesatnya pembangunan di Kota Jambi sebagai Ibukota Propinsi merupakan daya tarik bagi pengunjung/pendatang untuk berdomisili/menetap di Kota Jambi, hal ini tentunya otomatis akan menambah laju pertumbuhan penduduk yang dari tahun ketahun terus meningkat. Data jumlah dan kepadatan penduduk secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.5 Luas Wilayah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan tahun 2006

Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Penduduk	Kepadatan Penduduk
(1)	(2)	(3)	(4)
Kota Baru	77,80	100,663	1.294,2
Jambi Selatan	34,07	98,507	2.891,3
Jelutung	7,92	60,791	7.675,6
Pasar Jambi	4,02	13,964	3.473,6
Telanaipura	30,39	76,045	2.502,3
Danau Teluk	15,70	12,119	771,9
Pelayangan	15,29	12,312	805,2
Jambi Timur	20,21	78,159	3.867,3
Jumlah	205,38	452,560	2.203,3

Sumber : Kantor Statistik Kota Jambi, 2007

2. Kebijakan Pendanaan Lingkungan, Sosial, Ekonomi Dan Budaya Didaerah Dalam Rangka Melaksanakan Pembangunan Yang Berkelanjutan Dan Berwawasan Lingkungan Hidup.

Pada era otonomi daerah saat ini, masing-masing daerah dituntut untuk mengoptimalkan potensi sumber daya yang ada di daerah masing-masing, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Oleh karena itu pembangunan yang berkelanjutan menjadi suatu yang penting. Pengelolaan sumber daya alam akan ditujukan untuk mendukung pembangunan ekonomi dan peningkatan kondisi sosial budaya masyarakat, hal ini dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan dengan menginternalisasikan faktor lingkungan hidup pada setiap kebijakan pembangunan.

Hal tersebut tentunya membutuhkan pemikiran dan perhatian yang serius dari berbagai pihak dalam upaya menjaga keseimbangan antara eksploitasi dengan kelestarian sumber daya alam tersebut demi tercapainya Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*), yaitu pembangunan yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan manusia saat ini, tanpa mengurangi potensi pemenuhan aspirasi dan kebutuhan manusia pada generasi-generasi mendatang. Pembangunan berkelanjutan didasarkan atas kesejahteraan masyarakat serta keadilan dalam jangka waktu pendek, menengah dan panjang dengan keseimbangan pertumbuhan ekonomi, dinamika sosial dan pelestarian lingkungan hidup.

Fungsi lingkungan perlu dilestarikan demi kepentingan manusia baik dalam jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Pengambilan keputusan dalam pembangunan perlu memperhatikan pertimbangan daya dukung lingkungan sesuai fungsinya. Daya dukung lingkungan menjadi kendala (*constraint*) dalam pengambilan keputusan dan prinsip ini perlu dilakukan secara kontinyu dan konsekuen. Untuk itu, kebijakan pembangunan bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup diarahkan pada:

1. Mengembangkan kebijakan pengelolaan limbah industri dan rumah tangga dalam satu kesatuan sistem pengelolaan kawasan terpadu,

2. Meningkatkan kemampuan profesionalisme sumber daya kelembagaan yang menangani dampak lingkungan,
3. Menegakan dan mengembangkan instrumen pengendalian terhadap aktifitas- aktifitas yang mengarah pada pengrusakan dan pencemaran lingkungan fisik dan sosial.
4. Mempertahankan dan mengembangkan kawasan hijau.



Guna mendukung kebijakan tersebut, Pemerintah Kota Jambi melalui Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah terus berupaya merealisasikan kebijakan tersebut dalam tugas pokok sebagai koordinator bidang lingkungan hidup yang tertuang dalam visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan selama kurun waktu lima tahun yang dipilah menjadi tahunan.

Pernyataan visi untuk pengendalian dampak lingkungan hidup di Kota Jambi dan harapan yang akan diwujudkan pada masa datang adalah **“Terwujudnya lingkungan Kota Jambi yang teduh dengan pembangunan lingkungan hidup yang serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan”**

Makna yang terkandung dalam visi tersebut yaitu mewujudkan pelestarian lingkungan hidup dalam suatu penataan wilayah yang serasi, selaras dan seimbang melalui kegiatan pengawasan, pengendalian, pemantauan dan pemulihan lingkungan hidup dengan melibatkan peranserta masyarakat yang berkeadilan dan berkesinambungan.

Untuk dapat mewujudkan visi lingkungan hidup Kota Jambi tersebut, ditetapkan dua misi pembangunan lingkungan hidup, yaitu sebagai berikut:

1. Merencanakan dan merumuskan kebijakan teknis pemantauan dan pemulihan lingkungan hidup;
2. Melakukan pengembangan dan pembinaan teknis pengawasan dan koordinasi lingkungan hidup.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penetapan visi dan misi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan perencanaan teknis pemantauan lingkungan hidup;
2. Meningkatkan perumusan kebijakan teknis pemulihan lingkungan hidup;
3. Meningkatkan pengembangan lingkungan hidup dengan metode kelembagaan yang terarah.
4. Meningkatkan pembinaan teknis pengawasan dan koordinasi lingkungan hidup yang terpadu.

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. Terlaksananya perencanaan teknis pemantauan lingkungan hidup yang serasi;
2. Terwujudnya lingkungan hidup yang selaras dan seimbang;
3. Terlaksananya pemulihan lingkungan hidup daerah;
4. Terwujudnya pengembangan lingkungan hidup yang sehat;
5. Terwujudnya metode kelembagaan lingkungan hidup yang terarah;
6. Terwujudnya pembinaan teknis pengawasan dan penanggulangan lingkungan hidup;
7. Terwujudnya koordinasi yang terpadu dalam penanggulangan lingkungan hidup.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan dalam pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup, ditetapkan suatu kebijaksanaan yang merupakan pedoman pelaksanaan kegiatan selanjutnya, yaitu:

1. Mengembangkan kebijakan pengelolaan limbah industri dan rumah tangga dalam suatu kesatuan sistem pengelolaan kawasan yang terpadu, dengan program prioritas antara lain: (i) Program Kota Bersih, (ii) Program Kali Bersih.

2. Meningkatkan kemambuan profesionalisme sumber daya kelembagaan yang menangani masalah dampak lingkungan, dengan program prioritas antara lain: (i) Program Peningkatan Sumber Daya Manusia, (ii) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana.
3. Menegakkan dan mengembangkan instrumen pengendalian terhadap aktifitas-aktifitas yang mengarah pada pengrusakan dan pencemaran lingkungan fisik dan sosial, dengan program prioritas antara lain: Penyusunan Peraturan Daerah untuk mengatasi pencemaran lingkungan hidup.
4. Mempertahankan dan mengembangkan kawasan-kawasan hijau dengan program prioritas antara lain: (i) Rehabilitasi Penghijauan, (ii) Peduli Lingkungan, (iii) Rehabilitasi Permukiman Kumuh.

Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kota Jambi membutuhkan dukungan dana yang relatif besar tetapi kenyataan yang ada dari tahun ketahun dana yang tersedia / dikelola oleh Bapedalda Kota Jambi kenaikannya tidak signifikan dengan kerusakan dan pencemaran lingkungan yang terjadi. Besarnya anggaran pengelolaan lingkungan hidup dapat dilihat pada tabel 1.5.

Tabel 1.6 Anggaran Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Jambi

No.	Tahun	Anggaran Lingkungan (Rp.) *)			
		APBD	APBN **) / DAK	BLN ***)	Total
1	2007	2.115.012.000	920.000.000	-	3.035.012.000
2	2006	1.884.494.000	333.334.000	-	2.217.828.000
3	2005	1.526.277.000	-	-	1.526.277.000

Sumber: Bapedalda Kota Jambi

Disamping membutuhkan dana yang besar untuk pengelolaan lingkungan hidup di Kota Jambi, perlu dukungan jumlah / tenaga personil yang cukup di Instansi Pengelolaan Lingkungan. Jumlah personil menurut tingkat pendidikan di Bapedalda Kota Jambi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.7 Jumlah Personil Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin	
		Laki-laki	Perempuan
1	SD	1	-
2	SLTP	1	-
3	SLTA	8	5
4	Diploma	1	1
5	Sarjana	9	10
6	Master	4	-
7	Doktor	-	-
Jumlah		24	16

Sumber: Bapedalda Kota Jambi, 2007

Untuk terlaksananya program pengelolaan lingkungan di Kota Jambi dengan baik, disamping membutuhkan dana/biaya yang relatif besar, jumlah personil/tenaga pengelola lingkungan yang memadai dan partisipasi masyarakat yang aktif juga diperlukan perangkat hukum yang menunjang.

Beberapa peraturan perundang-undangan yang telah ada untuk mengantisipasi pengrusakan lingkungan Kota Jambi antara lain :

1. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 09 Tahun 1997 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Jambi No. 08 Tahun 1985 tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban Umum
2. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 08 Tahun 2000 tentang Izin Undang-undang Gangguan bagi Kegiatan Usaha, Perusahaan dan Industri
3. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet.
4. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 05 Tahun 2002 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi Tahun 2000-2010
5. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 24 Tahun 2002 tentang Izin usaha Penambangan Bahan Galian Golongan C.
6. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 36 Tahun 2002 tentang Penghijauan Kota

7. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 38 Tahun 2002 tentang Izin Pembuangan Limbah Cair.
8. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 42 Tahun 2002 tentang Izin pengelolaan Air Bawah Tanah.
9. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 47 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum
10. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 09 Tahun 2005 tentang Izin Gangguan Kegiatan Usaha, Perusahaan dan Industri.
11. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet
12. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyedia Jasa Penyelesaian sengketa Lingkungan Hidup
13. Keputusan Walikota Jambi Nomor 216 Tahun 2001 tentang Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet.
14. Keputusan Walikota Jambi Nomor 186 Tahun 2003 tentang Mekanisme Pengaduan di Bidang Lingkungan Hidup di Kota Jambi.
15. Keputusan Walikota Jambi 309 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 38 Tahun 2002 tentang tentang Penghijauan Kota
16. Keputusan Walikota Jambi 331 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 38 Tahun 2002 tentang Izin Pembuangan Limbah Cair.
17. Keputusan Walikota Jambi 186 Tahun 2005 tentang Pembentukan Tim Pengawas dan penertiban Tempat Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet
18. Instruksi Walikota Jambi Nomor 02 Tahun 2005 tentang Penanaman Pohon Pelindung.
19. dan sebagainya

Secara nasional Kota Jambi merupakan tujuan investasi yang menguntungkan semua pihak, apalagi dengan tata ruang perkotaan yang akan mengembangkan Kota Jambi sebagai kota industri dan jasa yang

berbasiskan kepada pengembangan industri hasil pertanian. Kemudian pengembangan sebagai kota pendidikan, pusat perdagangan grosir dan eceran serta pengembangan ke arah permukiman dan perkantoran.

Dalam konstilasi regional dan strategi pembangunan wilayah Propinsi Jambi, Kota Jambi merupakan Pusat Pengembangan Wilayah Pembangunan “B” yang diarahkan sebagai kawasan interaksi antara kegiatan ekonomi lokal dan regional dengan kegiatan ekonomi global.

Perkembangan ini di dukung pula oleh perkembangan sektor-sektor perdagangan, industri dan jasa yang merupakan tulang punggung pertumbuhan ekonomi daerah. Terbukanya peluang Kota Jambi menjadi pusat bisnis di era pasar global lantaran posisinya yang sangat strategis sebagai simpul yang menghubungkan Lintas Tengah dan Timur Sumatera, sehingga akses wilayah ini menjadi mudah, baik dari dan ke kota-kota utama di Sumatera maupun dari dan ke pusat-pusat perdagangan internasional khususnya Malaysia dan Singapura serta Thailand bagian Selatan karena posisinya sebagai wilayah belakang (*hinterland*) segitiga pertumbuhan SIJORI (Singapura, Johor, dan Riau), Indonesia, Malaysia, Singapura Growth Triangle (IMS-GT). Kemudian posisi Jambi yang berdekatan dengan Batam yang menjadi salah satu pelabuhan ekspor-impor ke wilayah Batam. Hal ini mempertegas posisi Jambi sebagai investasi terbaik dimasa mendatang, baik untuk jalur distribusi barang dan jasa, pariwisata maupun perdagangan antar daerah dan antar bangsa.

Oleh karena itu, saat ini sejalan dengan semangat Otonomi Daerah, Pemerintah Kota Jambi berusaha meningkatkan pertumbuhan pembangunan ekonomi daerah dengan membuka lebar kesempatan kepada dunia usaha atau para investor baik domestik maupun asing untuk menanamkan modalnya. Dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan produktifitas dari berbagai sumber daya, peluang dan prospek bisnis yang ada di daerah Jambi.

Posisi Kota Jambi sebagai ibukota Propinsi Jambi, menciptakan *internal economies* tersendiri bagi perkembangan kota. Di satu sisi posisi ini cukup menguntungkan kepada perkembangan perekonomian, namun di sisi lain menimbulkan konsekwensi untuk menyediakan biaya perawatan

sarana dan prasarana publik yang cukup signifikan dalam kelompok komponen biaya pada anggaran daerah, yang sering tidak diduga.

Komponen-komponen yang dianggap memegang peranan terhadap pertumbuhan perekonomian kota antara lain Komponen sosial / demografi, dapat dilihat dari indikator dan parameter berikut:

- a. Pola perkembangan penduduk, antara lain: (i) jumlah penduduk menurut umur, jenis kelamin, mata pencaharian, dan tingkat pendidikan, (ii) kepadatan penduduk dan sebaran kepadatan penduduk, pertumbuhan penduduk (tingkat kelahiran, tingkat kematian bayi dan tingkat kematian kasar)
- b. Pola perpindahan penduduk (mobilitas), baik perpindahan ke luar dan masuk ke suatu daerah secara umum maupun musiman atau tetap.

Kebijakan Pemerintah Kota Jambi diprioritaskan kepada peningkatan utilitas kota sebagai pendorong untuk tumbuh dan berkembangnya ekonomi Kota Jambi, bidang sosial budaya dan bidang fisik prasarana yang berwawasan lingkungan.

Pembangunan bidang ekonomi ditujukan untuk menciptakan ekonomi yang fundamentalnya kuat, dalam rangka mengatasi krisis ekonomi yang masih melanda masyarakat melalui sistem yang mampu memberi sinergi antar pelaku ekonomi yang ada dengan masyarakat yaitu melalui perekonomian yang berbasis pada ekonomi kerakyatan. Karena itu pengembangan ekonomi rakyat pada sektor industri (kecil dan menengah), pertanian, perdagangan, koperasi dan pariwisata akan dijadikan sektor utama dalam perencanaan pembangunan.

Laju pertumbuhan ekonomi tahun 2006 di Kota Jambi mengalami kenaikan yang cukup tinggi yaitu sebesar 5,93% dimana pada tahun sebelumnya (tahun 2005) laju pertumbuhan telah mencapai 5,69%. Dikarenakan menurunnya produksi minyak dan gas bumi di Kota Jambi, mengakibatkan laju pertumbuhan tanpa minyak dan gas bumi mencapai 6,35%. Ini menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi tanpa minyak lebih besar bila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi minyak dan gas bumi. Bila dicermati laju pertumbuhan ekonomi (tanpa migas) terus

mengalami kenaikan pada tahun 2004 laju pertumbuhan ekonomi sebesar 6,10%, kemudian pada tahun 2005 mengalami kenaikan mencapai 6,25% dan di tahun 2006 mencapai 6,35%.

Sedangkan laju pertumbuhan ekonomi (termasuk minyak dan gas bumi) dari tahun 2004 mengalami pertumbuhan lebih kecil bila dibandingkan dengan PDRB tanpa minyak dan gas bumi. Hal ini dapat terjadi dikarenakan laju pertumbuhan produksi minyak dan gas bumi semakin berkurang, sedangkan kegiatan ekonomi lainnya mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan.

Tabel 1.8 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kota Jambi (Atas Dasar Harga Konstan 2000) Tahun 2006

No.	Lapangan Usaha	2006
(1)	(2)	(3)
1	Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan.	2,29
2	Pertambangan Dan Penggalian	0,42
3	Listrik, Gas Dan Air Bersih	5,87
4	Bangunan	10,22
5	Perdagangan Hotel Dan Restoran	9,75
6	Pengangkutan Dan Komunikasi	5,53
7	Keuangan, Persewaan Dan Jasa Perusahaan	5,79
8	Jasa-jasa	3,07
	Produk Domestik Regional Bruto	5,93
	PDRB Tanpa Migas	6,35

Sumber: PDRB Kota Jambi 2006

Pertumbuhan ekonomi tertinggi di tahun 2006 berada pada sektor bangunan yang mencapai pertumbuhan sebesar 10,22%, kemudian diikuti oleh sektor perdagangan hotel dan restoran (9,75%), berikutnya sektor listrik, gas dan air (5,87%). Sedangkan sektor yang mengalami laju pertumbuhan yang kecil adalah sektor pertambangan dan penggalian yaitu hanya sebesar 0.42%, dan diikuti oleh sektor pertanian sebesar 2,29%.

PDRB Kota Jambi Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dari tahun ketahun terus mengalami peningkatan, pada tahun 2006 telah mencapai Rp. 4.851,6 Milyar dengan Minyak dan Gas (MIGAS) sedangkan tanpa Minyak dan Gas adalah sebesar Rp. 4.52,9 Milyar.

Grafik

Sementara itu PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK tahun dasar 2000) nilai PDRB Tahun 2006 dengan Minyak dan Gas sebesar Rp. 2.665,4 Milyar sedangkan tanpa Minyak dan Gas sebesar Rp. 2.494,7 Milyar.

Tabel 1.9 Produk Domestik Regional Bruto Kota Jambi (Milyar)

Keterangan	Tahun				
	2002	2003	2004	2005	2006
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku					
PDRB	2.662,3	3.145,3	3.620,7	4.250,2	4.851,6
PDRB Tanpa Minyak	2.382,9	2.859,6	3.349,2	3.935,1	4.523,9
PDRB Atas Dasar Harga Konstan Thn 2000					
PDRB	2.151,4	2.255,7	2.372,0	2.506,9	2.655,4
PDRB Tanpa Minyak	1.979,6	2.080,7	2.207,7	2.345,7	2.494,7

Sumber: PDRB Kota Jambi 2006

Secara rinci distribusi PDRB Kota Jambi menurut lapangan usaha dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.10 Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Menurut Lapangan
Usaha (Harga Konstan) Kota Jambi Tahun 2003 – 2005

NO	URAIAN	2004	2005	2006 *
1	2	3	4	5
1	PERTANIAN, PETERNAKAN, KEHUTANAN & PERIKANAN	69.386,10	60.601,20	61.986,60
	a. Tanaman Bahan Makanan	27.587,90	27.861,80	28.215,60
	b. Tanaman Perkebunan	-	-	-
	c. Peternakan	25.436,40	26.230,80	27.091,20
	d. Kehutanan	-	-	-
	e. Perikanan	6.361,80	6.508,70	6.679,80
2	PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN	175.398,60	173.168,80	173.891,10
	a. Minyak dan Gas Bumi	164.317,60	161.161,80	160.726,60
	b. Pertambangan Tanpa Gas	-	-	-
	c. Penggalian	11.080,80	12.007,10	13.164,50
3	INDUSTRI PENGOLAHAN	460.267,40	466.607,90	488.631,20
	a. Industri Migas	-	-	-
	1. Pengilangan Minyak Bumi	-	-	-
	2. Gas Alam Cair	-	-	-
	b. Industri Tanpa Migas	450.267,40	465.607,90	488.53,20
	1. Makanan, Minuman dan Tembakau	272.015,90	282.931,00	296.019,10
	2. Tekstil, Barang Kulit dan Alas Kaki	3.518,70	3.631,90	3.760,20
	3. Brang Kayu dan Hasil Hutan Lainnya	133.954,70	137.203,60	143.542,50
	4. Kertas dan Barang Cetakan	6.090,40	6.300,70	6.317,00
	5. Pupuk, Kimia dan Barang dari Karet	13.066,60	13.311,60	14.002,50
	6. Semen dan Barang Galian Bukan Logam	9.762,80	9.979,00	10.752,30
	7. Logam Dasar Besi dan Baja	-	-	-

1	2	3	4	5
	8. Alat Angkutan , Mesin dan Peralatannya	2.195,10	2.252,90	2.391,70
	9. Barang Lainnya	9.63,10	9.997,20	10.646,00
4	LISTRIK, GAS DAN AIR BERSIH	60.557,60	64.643,60	68.437,10
	a. Listrik	50.273,10	53.797,20	56.965,90
	b. Gas Kota	-	-	-
	c. Air Bersih	10.284,50	10.846,40	11.471,20
5	BANGUNAN	143.696,60	165.473,50	182.384,90
6	PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN	507.483,50	554.429,00	608.510,20
	a. Perdagangan Besar dan Eceran	443.740,20	487.559,60	537.583,20
	b. Hotel	20.919,00	22.210,90	23.821,20
	c. Restoran	42.824,30	44.658,60	47.105,90
7	PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI	480.169,20	506.154,60	533.082,90
	a. Pengangkutan	434.101,90	456.181,90	480.846,50
	1. Angkutan Rel	-	-	-
	2. Angkutan Jalan Raya	253.252,60	264.501,00	276.906,10
	3. Angkutan Laut	50.330,70	52.205,40	53.813,30
	4. Angkutan Sungai Danau Penyeberangan	26.693,90	27.287,90	29.072,60
	5. Angkutan Udara	76.188,80	82.391,90	89.518,70
	6. Jasa Penunjang Angkutan	28.636,00	29.795,70	31.538,70
	b. Komunikasi	45.067,20	48.972,60	52.236,40
	1. Pos dan Telekomunikasi	45.602,00	48.446,90	51.658,60
	2. Jasa Penunjang Telekomunikasi	465,20	525,70	577,50
8	KEUANGAN, PERSEWAAN, DAN JASA PERUSAHAAN	166.779,0	179.833,60	190.249,80
	a. Bank	72.130,60	78.478,80	82.295,00
	b. Lembaga Keuangan Tanpa Bank	23.065,80	24.754,60	25.499,70
	c. Jasa Penunjang	1.907,40	2.059,40	2.155,10
	d. Sewa Bangunan	63.647,50	69.201,60	74.634,00
	e. Jasa Perusahaan	5.028,40	5.339,10	5.676,00

9	JASA - JASA	329.288,90	337.998,20	348.371,10
	a. Pemerintah dan Pertahanan	293.172,20	300.355,00	309.000,50
	1. Adm. Pemerintahan dan Pertahanan	184.196,10	188.169,20	193.438,00
1	2	3	4	5
	2. Jasa Pemerintahan lainnya	108.976,00	112.185,80	115.562,60
	b. Swasta	36.116,70	37.643,20	39.370,60
	1. Sosial Kemasyarakatan	18.599,00	19.447,70	20.391,00
	2. Hiburan dan Rekreasi	5.208,10	5.264,40	5.338,60
	3. Perorangan dan Rumah Tangga	12.309,60	12.931,00	13.641,00
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	2.372.027,30	2.606.910,30	2.655.445,00
	P D R B TANPA MINYAK	2.207.709,70	2.346.748,60	2.494.718,40

Sumber : PDRB Kota Jambi,, 2006.

*=Angka sementara

BAB II

ISU LINGKUNGAN HIDUP UTAMA

Kebijakan pelaksanaan pembangunan yang semula dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat ternyata hanya dapat mensejahterakan sekelompok kecil masyarakat. Ironisnya, kegiatan pembangunan ini justru lebih banyak menurunkan kualitas hidup masyarakat sebagai akibat dari penurunan kualitas lingkungan hidup. Atas pertimbangan inilah, badan internasional PBB dalam laporannya "*Our Common Future*" mendeklarasikan konsep pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*) yang berdimensi moral.

Indonesia merupakan salah satu Negara berkembang yang mengeluarkan agenda 21 mengenai pembangunan berkelanjutan ditingkat local dan Nasional pada tahun 1997 serta memiliki agenda 21 sektoral yang dapat dijadikan dasar dalam pelaksanaan agenda pembangunan berkelanjutan. Indonesia meratifikasi seluruh konvensi hasil UNCED 1992 (UNFCCC, UNCBD dan UNCCD) dan memiliki perangkat normative penunjang pelaksanaan agenda pembangunan berkelanjutan seperti Undang-undang Lingkungan Hidup serta beberapa ketentuan dalam bentuk Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan Keputusan Menteri.

Sesuai dengan kesepakatan nasional tentang Pembangunan Berkelanjutan yang ditetapkan dalam Indonesian Summit on Sustainable Development (ISSD) di Yogyakarta pada tanggal 21 Januari 2004, telah ditetapkan 3 (tiga) pilar utama pembangunan berkelanjutan yang saling terkait dan saling menunjang yakni pembangunan ekonomi, pembangunan sosial dan pelestarian lingkungan hidup.

Untuk menjawab permasalahan serta amanat kebijakan nasional lingkungan hidup dimaksud maka salah satu strategi pembangunan yang dapat dipakai antara lain pembangunan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang ditujukan terciptanya keseimbangan dan kelestarian fungsi sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan. Salah satu bentuk nyata dalam penyerapan strategi tersebut yaitu pada tataran

implementasi pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup sudah seharusnya membuka kesempatan seluas-luasnya pada masyarakat untuk turut mengakses dan berperan serta dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup melalui penghargaan terhadap nilai-nilai local yang ada.

Pembangunan Otonomi Kabupaten/Kota akan memunculkan permasalahan akan adanya eksploitasi yang tak tertahankan pada sumberdaya alam dan berdampak pada kerusakan lingkungan. Pengelolaan sumberdaya alam yang tidak/kurang bijaksana pada akhirnya memaksa kita berkorban sesuatu untuk keberhasilan di satu bidang lainnya. Misalnya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi diperoleh dengan eksploitasi besar-besaran dari sumberdaya alam yang kemungkinan besar telah merusak lingkungan atau terjadi pencemaran dimana-mana. Dengan kata lain kerusakan lingkungan merupakan harga yang harus dibayar (pengorbanan) dari pertumbuhan ekonomi yang diperoleh.

Kualitas lingkungan yang baik merupakan salah satu modal dasar penting bagi terlaksananya pembangunan yang berkelanjutan. Kualitas lingkungan berpengaruh terhadap kualitas hidup masyarakat local dan penduduk yang bekerja serta yang berkunjung ke daerah tersebut. Banyak aktivitas manusia yang memiliki dampak buruk terhadap kualitas lingkungan karena pengelolaan sampah dan limbah yang kurang baik, kepedulian masyarakat yang rendah terhadap kebersihan lingkungan, penggunaan yang semakin meningkat bahan-bahan yang tidak mampu didegradasi oleh alam serta bahan xenobiotik lain yang berdampak serius terhadap kualitas lingkungan. Peningkatan jumlah dan penggunaan kendaraan pribadi dan kendaraan tidak layak jalan serta operasi industri yang berpengelolaan buruk merupakan penyebab penting lain menurunnya kualitas lingkungan. Perencanaan tata ruang dan wilayah yang tidak mempedulikan kaidah pelestarian lingkungan, kelemahan birokrasi, penegakan hukum dan kelembagaan juga menjadi faktor penting yang mempengaruhi kualitas lingkungan.

Pencemaran yang berasal dari rumah tangga dan industri menjadi ancaman untuk wilayah perkotaan di Indonesia, termasuk Kota Jambi. Masalah pokok mencakup limbah manusia dan industri, sampah, dan

pelepasan zat-zat pencemar udara oleh kendaraan bermotor serta kegiatan industri. Pencemaran tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kesehatan penduduk di wilayah perkotaan.

Menurut '*World Bank Country Study*' ancaman yang paling besar di wilayah perkotaan di Indonesia adalah:

- Air yang tidak bersih untuk diminum langsung sebagai salah satu sumber utama penyakit
- Pembuangan limbah cair yang belum memenuhi baku mutu kemedi atau kebadan-badan air.
- Pengelolaan sampah yang kurang memadai (penumpukan secara tidak terkendali, pembuangan ke dalam sungai dan pembakaran)
- Pelepasan zat-zat pencemar udara oleh kendaraan bermotor karena gas kendaraan bermotor mengandung debu/jelaga dan timah hitam (timbal)

A. METODE PENYUSUNAN

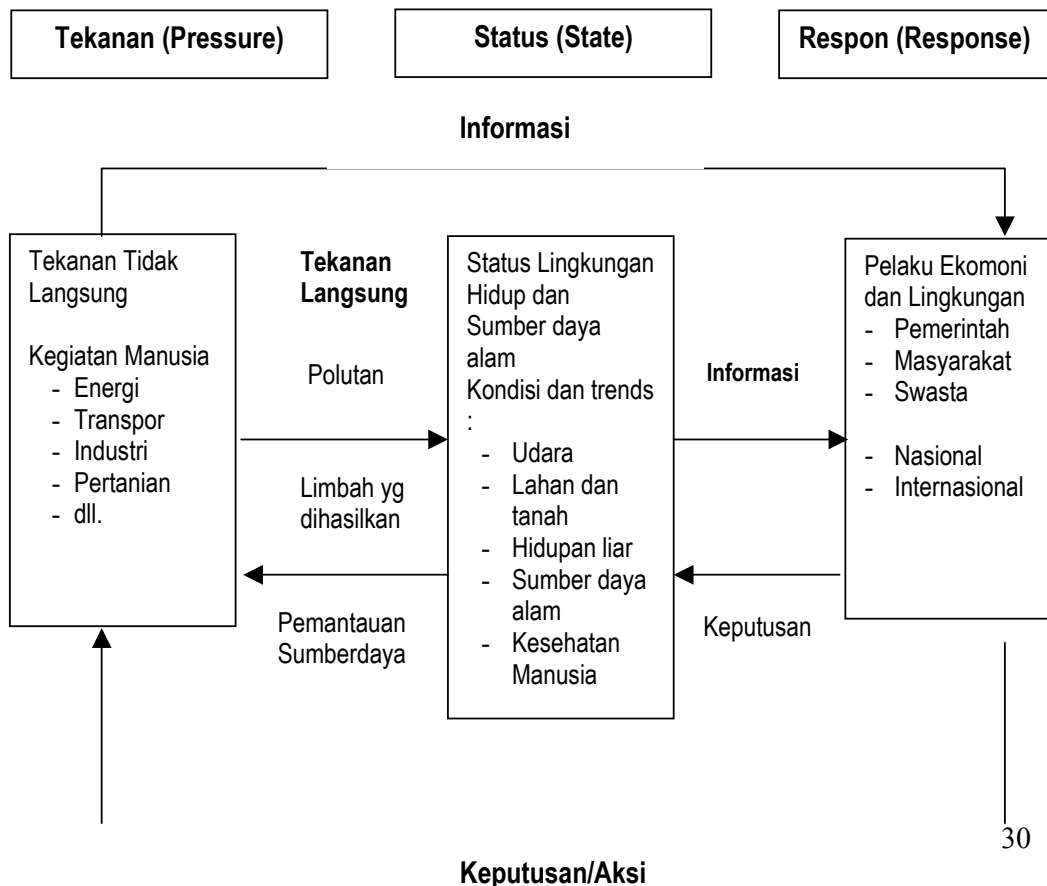
Permasalahan lingkungan yang terjadi pada salah satu komponen lingkungan pasti akan mempengaruhi yang lain dikarenakan setiap komponen lingkungan saling berinteraksi sehingga membentuk kesatuan yang utuh. Begitu kompleksnya permasalahan lingkungan yang terjadi, maka dalam penyelesaiannya diperlukan pendekatan yang intergral, terpadu agar menghasilkan keputusan tindakan yang tepat.

Penyusunan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Kota Jambi tahun 2007 menggunakan metode penyusunan sesuai dengan yang sudah disepakati oleh kelompok negara-negara Asia Pasifik dan Nasional, yaitu metode dengan model *Pressure – State – Response* (PSR). Model ini pada prinsipnya digunakan untuk menganalisis interaksi antara tekanan (*Pressure*) yang terjadi pada lingkungan, kondisi atau Status Lingkungan (*State*) dan Tanggapan (*Response*) yang dilakukan untuk menangani masalah yang terjadi. Pendekatan dengan metode/model ini memiliki keuntungan karena masalah, faktor penyebab dan upaya yang dilakukan dapat disajikan dengan jelas sehingga rekomendasi yang disarankan

sebagai bahan pengambil keputusan dapat diketahui kelayakan maupun korelasinya.

Prinsip yang digunakan pada metode/model PSR didasarkan pada konsep hubungan sebab akibat, terutama oleh kegiatan manusia dalam rangka melaksanakan pembangunan disegala bidang. Dalam proses pembangunan, sudah pasti ada kegiatan pemanfaatan sumber daya alam, sehingga mengubah lingkungan yang ada menjadi lingkungan baru sesuai dengan kehendak manusia. Kegiatan tersebut menjadikan perubahan terhadap kualitas maupun kuantitas sumber daya alam oleh manusia. Dalam hal ini terjadi tekanan terhadap sumber daya alam oleh manusia yang mengakibatkan munculnya masalah yang harus direspon dalam bentuk kebijakan, program aksi maupun kegiatan.

Pendekatan lain yang digunakan dalam analisis permasalahan adalah menggunakan pendekatan konsep ekosistem dengan prinsip pemahaman permasalahan lingkungan secara holistik, artinya bahwa masing-masing komponen lingkungan harus dilihat sebagai satu kesatuan yang utuh, tidak dilihat secara bagian perbagian (parsial) atau terpisah. Secara skematis, model PSR adalah sebagai berikut :



Gambar. Pressure – State – Response Model (Sumber : OECD. 1993)

1. Banjir/genangan air.

Permasalahan utama lingkungan di Kota Jambi salah satunya adalah terjadinya genangan air atau banjir di beberapa wilayah dalam Kota Jambi pada beberapa tahun terakhir ini, hal ini timbul dikarenakan :

- Merupakan kota yang berada didataran rendah dan dialiri Sungai Batanghari dan 9 sungai-sungai kecil serta 13 anak sungai yang berada dalam kota Jambi.
- Pengaruh debit air sungai yang meningkat akibat hujan didaerah hulu/hilir sungai.
- Perubahan tata guna lahan didaerah aliran sungai.
- Pendangkalan sungai akibat sedimentasi. Pembuangan sampah yang tidak tertib.
- Topografi, struktur tanah dan vegetasi yang kurang baik.
- Drainase yang kurang dan belum berfungsi dengan baik.

Meskipun secara umum kondisi drainase/saluran air yang ada di Kota Jambi adalah permanen (beton) dan cukup baik, namun banyak juga yang sudah rusak, baik karena faktor usia, maupun karena bencana lain. Dengan semakin pesatnya perkembangan pembangunan kota serta jumlah penduduk yang semakin bertambah dengan aktifitas perniagaan yang padat tentunya kapasitas daya tampung dari saluran yang sudah ada tersebut tidak lagi mencukupi. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Pemerintah Kota Jambi merencanakan pembuatan Master Plan Drainase Lingkungan Kota Jambi (ternyata selama ini belum pernah ada). Dengan demikian, jika Master Plan Drainase Lingkungan tersebut telah dibuat dan ditindaklanjuti dengan pembangunan ataupun rehabilitasi konstruksi drainase dan pengelolaan dengan baik diharapkan akan dapat mengatasi genangan-genangan air dalam kota.

2. Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan.

Sementara itu isu lainnya yang tak kalah pentingnya sejalan dengan semakin pesatnya perkembangan pembangunan Kota Jambi serta

jumlah penduduk yang semakin bertambah, dan juga menjadi permasalahan di kota-kota lainnya adalah pencemaran dan kerusakan lingkungan, secara rinci adalah sebagai berikut:

a. Penurunan Kualitas Air

Penurunan kualitas air sungai sebagian besar diakibatkan oleh semakin banyaknya jenis usaha dan/atau kegiatan yang membuang limbah cair baik langsung maupun tidak langsung ke sungai maupun anak sungai dalam Kota Jambi. Disamping kurangnya kesadaran dari para pelaku usaha untuk memeriksakan air limbah yang dihasilkan sebelum dibuang ke media yang dapat mencemari lingkungan sekitar.

Masalah yang ditimbulkan dari aktifitas perusahaan/pabrik, rumah sakit, hotel, rumah makan/restoran, cucian mobil dan usaha-usaha lain adalah sumber penghasil limbah cair maupun limbah padat di kota Jambi yang berdampak pada penurunan kualitas air. Hal ini disebabkan masih banyaknya badan-badan usaha yang belum memiliki instalasi pengolahan air limbah (IPAL) sehingga limbah yang dihasilkan dan dibuang ke media mutunya tidak sesuai dengan standar baku mutu yang telah ditentukan.

Selain pencemaran dari jenis usaha dan/atau kegiatan tersebut juga diakibatkan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan sungai, yaitu masih banyaknya masyarakat yang membuang limbah rumah tangga, baik limbah cair (berupa air cucian), limbah dari WC yang langsung dibuang ke sungai tanpa melalui septictank maupun limbah padat yang berupa sampah.

Disamping terbatasnya pada penyedotan lumpur tinja tangki septik rumah-rumah penduduk dan pengguna jasa lainnya, diangkut ke Instalasi Pengolahan Lumpur tinja (IPLT), sedangkan jumlah tangki septik yang dimiliki warga Kota Jambi pada akhir tahun 2005 menunjukkan jumlah sebanyak 91.204 unit atau 99,8% dari jumlah bangunan.

Jadi Masalah penanganan air limbah yang belum optimal, mendapat sorotan hal ini dikarenakan antara lain :

- Rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeliharaan tangki septik.
- Belum memiliki Master Plan Air Limbah dan Strategi Pengelolaannya.
- Operasional kinerja Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) belum optimal.
- Terbatasnya kemampuan teknik pengelolah dan ketersediaan lahan.
- Terbatasnya penyedotan lumpur tinja tangki septik rumah-rumah penduduk dan pengguna jasa lainnya,diangkut ke IPLT.

Salah satu sumber pencemaran dan kerusakan lingkungan adalah adanya aktaifitas pertanian, perikanan, pabrik/industri dan pertambangan galian C serta aktifitas pembangunan didaerah aliran sungai, hal ini berakibat pada pencemaran sungai, cadangan sumber daya alam yang cenderung menurun dan kerusakan daerah sempadan sungai/badan sungai.

b. Kualitas Udara.

Perkembangan Wilayah Kota Jambi yang semakin pesat seiring dengan keberadaan Kota Jambi sebagai Ibukota Provinsi dan menjadi pusat bisnis Propinsi Jambi menyebabkan semakin tingginya minat masyarakat untuk datang, berkunjung dan bertempat tinggal sementara di Kota Jambi. Hal ini menyebabkan semakin tingginya tingkat kepemilikan kendaraan bermotor yang berdampak pada tingginya penggunaan kendaraan bermotor di jalan.

Di Kota Jambi khususnya pada daerah aglomerasi perkotaan, penyumbang terbesar polusi udara adalah gas buang yang dikeluarkan oleh kendaraan bermotor. Sedangkan sektor industri yang juga merupakan penyebab adanya pencemaran udara, telah dialihkan ke daerah luar kota. Kondisi ini semakin diperburuk dengan rendahnya animo masyarakat untuk menggunakan sarana angkutan umum yang telah tersedia, sehingga menyebabkan semakin tingginya tingkat kepadatan lalu lintas sebagai dampak dari tingginya tingkat penggunaan kendaraan pribadi. Lebih kurang 80 % masyarakat lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi baik mobil maupun sepeda motor daripada menggunakan sarana angkutan umum.

Dengan melihat kondisi tersebut jelas akan menambah volume kepadatan lalu lintas, ditambah dengan kurangnya jalur hijau di pusat-pusat perkotaan, yang pada gilirannya dapat memberikan dampak terhadap penurunan kualitas udara ambien di Kota Jambi sebagai akibat dari besarnya volume gas buang yang dikeluarkan oleh kendaraan bermotor serta diperparah dengan banyaknya gas buang kendaraan bermotor yang emisinya tidak memenuhi ketentuan baku mutu yang dipersyaratkan. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengawasan laik jalan kendaraan bermotor berkait dengan ambang batas emisi gas buang terutama untuk kendaraan-kendaraan pribadi.

Penyebab lain yang dapat menurunkan kualitas udara di Kota Jambi adalah akibat dari pembukaan/pembakaran lahan-lahan baru untuk ladang atau tempat bercocok tanam yang dilakukan oleh masyarakat dipinggiran kota tanpa memikirkan kelestarian lingkungan dimasa yang akan datang.

c. Persampahan

Masalah lingkungan lainnya di Kota Jambi adalah masalah persampahan. Masalah ini timbul dikarenakan :

- volume sampah tidak tertampung di TPS dan kurangnya jumlah TPS.
- kurangnya alat pengangkut sampah.
- rendahnya kesadaran masyarakat.
- lahan TPA sudah hampir penuh
- penolakan masyarakat terhadap penempatan TPS
- belum memiliki master plan persampahan kota dan strategi pengelolaannya

Pengelolaan sampah di Kota Jambi selama ini dikelola oleh Kantor Pengelola Kebersihan dan Pemakaman, yang mana pengerjaannya dilimpahkan kepada pihak ketiga (CV. Usaha sehat Bersama) pada daerah-daerah tertentu (sesuai kontrak). Berbagai keluhan masyarakat tentang kinerja CV.USB dan keterbatasan sarana prasarana kebersihan menjadi perhatian lembaga eksekutif dan legislatif Kota Jambi. Untuk itu, Pemerintah Daerah Kota Jambi terus berupaya mengatasi masalah persampahan ini, baik meninjau ulang kontrak kerja

dengan pihak ketiga tersebut maupun dengan meningkatkan sarana dan prasarana kebersihan/persampahan yang ada.

3. Lahan Kritis Dan Alih Fungsi Lahan

Isu lingkungan yang tak kalah penting di Kota Jambi adalah adanya lahan kritis dan alih fungsi lahan. Hal ini diakibatkan:

- Perubahan fungsi lahan yang semula dari tanah kosong dijadikan lokasi perumahan dan lain-lain.
- Pembukaan lahan dengan cara pembakaran dipinggir-pinggir kota.
- Praktek pertanian yang tidak memperhatikan aspek konservasi tanah/kegiatan pertanian yang tidak terkendali.

B. Masalah Sosial .

Beberapa masalah sosial di Kota Jambi yang dapat menurunkan kualitas lingkungan hidup antara lain :

- Tingginya pertumbuhan penduduk dan tidak meratanya penyebaran penduduk,
- Masi adanya tempat/pemukiman kumuh dalam kota.
- Terbatasnya fasilitas & pelayanan kesehatan (terbatasnya jumlah askeskin & tenaga medis) yang mengakibatkan meningkatnya jumlah penderita penyakit setiap tahun meningkat.
- Kerawanan & kerentanan sosial (seperti meningkatnya gepeng, anjal dll).
- Terbatasnya & semakin menyempitnya lahan pemukiman dikerenakan pesatnya pembangunan (berubahnya fungsi lahan).
- Minimnya tempat penampungan anak-anak terlantar& gepeng .

Pemerintah Kota Jambi melalui dinas/instansi terkait terus berupaya mengatasi permasalahan melalui program-program yang ada dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan masalah tersebut (seperti rehabilitasi pemukiman kumuh, penghijauan dll).

Disamping itu banyaknya kelompok masyarakat dalam wadah yang beragam merupakan salah satu indikator kepedulian masyarakat

terhadap lingkungan, baik LSM maupun forum-forum yang tidak berbadan hukum dengan ruang lingkup lokal maupun nasional. Melalui dialog masukan-masukan dari masyarakat merupakan bahan bagi penyusun kebijakan.

Banyaknya forum yang berkembang dimasyarakat ternyata cukup membantu Pemerintah Daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup. Forum-forum tersebut sekaligus merupakan ujung tombak maupun kepanjangan tangan yang cukup efektif. Lembaga Independen Pemerhati Jambi, Forum Peduli Lingkungan, dan lain-lain merupakan wujud partisipasi masyarakat dengan ruang gerak sesuai dengan kebutuhan masyarakat sendiri, tetapi dalam pelaksanaannya kegiatan selalu bersama-sama dengan Pemerintah Daerah.

Kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan konservasi sumber daya alam merupakan kegiatan yang telah lama melibatkan masyarakat melalui kelompok-kelompok penghijauan, pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan dan lain-lain. Selain melaksanakan kegiatan berdasarkan peraturan-peraturan dari Pemerintah, kelompok-kelompok masyarakat tersebut juga memiliki aturan-aturan lokal yang tidak tertulis tetapi merupakan kesepakatan masyarakat setempat yang tetap diataati dan cukup efektif untuk memelihara kualitas lingkungan yang ada.

Disamping itu, beberapa dunia usaha yang ada di Kota Jambi juga menunjukkan kepeduliannya terhadap lingkungan. Hal ini dibuktikan oleh beberapa perusahaan yang mengadakan kegiatan seperti “Lomba Kebersihan Kelurahan” yang disponsori oleh Sampoerna Hijau (perusahaan rokok), “Lomba Jalan Santai Peduli Lingkungan” yang disponsori oleh Harian Independen (media massa) dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, “Gerakan Jambi Kota Beradat dan Kebersihan Lingkungan” yang diprakarsai oleh Keluarga Besar Putra Putri POLRI Kota Jambi, Program Bina Lingkungan dari PT. Bank Mandiri, dan sebagainya.

Disamping itu Pemerintah Kota Jambi juga telah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bertujuan meningkatkan

kualitas lingkungan hidup antara lain : Jumat bersih, lomba kebersihan tingkat kecamatan (program kota bersih), lomba kebersihan kantor, prokasi, program Batanghari bersih, lomba sekolah sehat, penanaman pohon pelindung, gerakan 1000 sapu lidi dll.

BAB IV U D A R A

Kualitas Udara

Di Kota Jambi kepadatan lalu lintas terus mengalami peningkatan, hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor yang berlalu lalang memadati ruas-ruas jalan di



Kota Jambi. Dengan melihat kondisi tersebut tentu saja akan berdampak terhadap kualitas udara di Kota Jambi, yang diperkirakan dapat mengalami penurunan kualitas udara ambien khususnya di wilayah perkotaan yang padat akan lalu lintasnya. Keadaan tersebut sebagai akibat dari banyaknya gas buang yang dikeluarkan oleh kendaraan bermotor.

Untuk memperjelas hal tersebut dapat dilihat perkembangan jumlah kendaraan bermotor di Wilayah Kota Jambi pada tabel berikut :

Tabel 4.1 Sarana Transportasi Darat di Kota Jambi Tahun 2001 – 2006

No	Sarana Transportasi Darat	Jumlah (unit)					
		2001	2002	2003	2004	2005	2006
1	Terminal						
	a. Kelas A	1	1	1	1	1	1
	b. Kelas B	1	2	2	2	2	2
	c. Kelas C	-	-	-	-	-	-

Sambungan table 4.1

2	Kendaraan Umum						
	a. AKAP	468	521	521	512	512	512
	b. AKDP	542	463	463	460	460	460
	c. Angkutan Kota	1.038	1.038	1.038	1.038	1.038	1.038
	d. Truck	2.333	2.418	2.418	1.460	1.460	1.460
	e. Taxi	80	80	80	80	80	80
	f. Angkutan Sewa	88	56	56	56	56	56
	g. Angkutan Pariwisata	15	15	15	15	15	15
3	Kendaraan Pribadi						
	a. Motor Roda Dua						
	b. Motor Roda Empat						

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Jambi, 2006

Dapat dilihat bahwa, meskipun pertambahan jumlah kendaraan umum di Kota Jambi setiap tahun ditekan melalui pengendalian penambahan kendaraan umum, khususnya angkot dengan tidak mengeluarkan izin trayek dan pembatasan pengeluaran plat kendaraan umum, sehingga pertumbuhan kendaraan umum di Kota Jambi tidak begitu signifikan. Akan tetapi jumlah kendaraan pribadi setiap tahunnya terus bertambah. Namun, data pertambahan kendaraan pribadi tidak dapat disebutkan dalam laporan ini, karena perkembangannya belum terdata dengan akurat. Hal ini disebabkan banyaknya kendaraan yang beroperasi di Kota Jambi yang masih menggunakan nomor kendaraan dari daerah lain, meskipun pemiliknya sudah menetap di Jambi. Disamping itu, dikarenakan Kota Jambi merupakan ibukota provinsi dan kota transit sehingga keluar masuknya kendaraan belum terdata dengan baik.

Namun yang menjadi kendala beberapa tahun terakhir adalah pertumbuhan kendaraan roda dua yang cukup pesat, apalagi pertumbuhan jasa angkutan ojek yang semakin marak. Hal ini, tentunya berdampak pada kualitas udara dan kesemrawutan wajah kota jika pertumbuhan jasa ojek ini tidak dikendalikan/diatur dengan baik.

Kendaraan bermotor adalah sumber langsung yang mengemisikan pencemar ke atmosfer, dengan jumlah trip (kendaraan per km) yang menentukan besaran emisi yang dibuang ke udara disamping faktor atau sistem transportasi yang ada. Sehingga masalah transportasi merupakan penyumbang terbesar dalam pencemaran udara ambien.

Pencemaran udara di perkotaan pada khususnya banyak diakibatkan oleh sumber bergerak, kendaraan bermotor hingga saat ini merupakan pencemar udara utama bagi sumber bergerak. Sumber pencemar (*pollutant*) dari kendaraan bermotor, berasal dari selimut mesin (*crankcase emission*), knalpot (*exhaust emission*), dan dari tangki bahan bakar (*fuel tank*) serta dari karburatornya (*carburetor*).

Bahan pencemar yang diemisikan oleh kendaraan bermotor dibedakan oleh zat pencemar gas dan zat pencemar Partikulat. Zat pencemar gas antara lain terdiri dari Karbondioksida (CO₂), Sulfur dioksida (SO₂), Nitrogen dioksida (NO₂), Hidrokarbon (HC), Ozon, dan Karbon monoksida (CO). Sedangkan zat pencemar Partikulat antara lain terdiri dari Dust (Debu), Smoke (asap), Fume, Mist (kabut), Fog Visible Mist dan Smog.

Untuk mengatasi permasalahan diatas perlu adanya kebijakan dari pemerintah di dukung oleh seluruh komponen masyarakat, melalui upaya pengendalian pencemaran udara. Salah satu kegiatan dalam upaya pengendalian pencemaran udara adalah melakukan pemantauan secara rutin terhadap kualitas udara ambien di beberapa titik padat lalu lintas.

Untuk menjaga kelestarian lingkungan terutama yang disebabkan pencemaran udara diwilayah Kota Jambi 2007 Pemerintah Daerah Kota Jambi melalui BAPEDALDA Kota Jambi telah melakukan pemantauan kondisi kualitas udara dengan alat AQMS dan PM10.

Pemantauan dilakukan dengan mengacu pada Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep - 45/MMENLH/10/1997 tentang Indek Standar Pencemaran Udara (ISPU). Pemantauan dilakukan selama satu tahun secara berkala bulan Januari sampai dengan Desember 2007.

Kualitas udara Kota Jambi dapat dilihat dari data pencemaran udara di Kota Jambi yang dikeluarkan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) Kota Jambi tahun 2007. Untuk lebih rinci dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut ini.

Tabel 4.2 Rekapitulasi Indeks Standar Pencemaran Udara Kota Jambi 01 Nopember 2006 s/d 31 Oktober 2007

No	BULAN											
	Nop	Des	Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt
1	45	41	42	41	53	49	48	53	50	48	40	53
2	46	47	37	44	56	56	41	46	52	46	41	55
3	39	46	39	43	51	54	43	48	58	49	44	54
4	40	42	40	39	55	47	37	45	53	52	46	53
5	49	33	41	42	57	53	38	41	43	54	49	56
6	53	39	38	40	56	55	40	43	45	51	56	57
7	68	48	43	45	53	51	45	49	41	47	54	59
8	62	34	46	47	58	46	46	44	38	40	57	43
9	35	41	52	46	56	48	49	46	36	42	50	44
10	39	43	55	43	54	45	53	48	37	40	53	42
11	41	39	37	41	52	42	51	43	39	42	48	46
12	42	49	43	48	50	37	55	52	41	44	46	47
13	46	43	39	49	49	35	50	50	43	46	44	45
14	44	46	38	47	42	40	48	38	44	48	45	55
15	39	40	37	50	36	38	50	40	47	49	47	54
16	41	42	42	52	39	43	46	44	45	53	46	57
17	42	44	38	54	41	45	49	41	52	56	45	49
18	45	47	39	51	45	48	53	43	56	52	42	47
19	43	45	41	48	44	52	48	38	57	57	43	43
20	40	46	37	46	47	49	55	39	51	49	44	39
21	38	43	40	44	44	56	51	42	49	52	39	37
22	44	41	38	43	40	53	42	40	48	48	37	41
23	42	38	36	40	45	47	44	41	45	46	53	43
24	39	37	37	44	49	38	47	46	53	43	55	45
25	41	40	39	42	52	44	48	49	55	42	56	44
26	45	39	43	46	55	46	45	52	58	48	58	48
27	43	34	41	51	51	43	49	57	59	45	54	52
28	40	38	39	49	48	40	48	54	52	42	47	54
29	42	41	36	*	50	39	46	47	54	41	49	56
30	38	39	37	*	53	47	52	49	55	54	45	55
31	*	40	39	*	50	*	47	*	48	55	*	52
Rata²	43,7	41,5	40,3	45,5	49,4	46,2	47,2	45,6	48,5	47,8	47,7	49,2

Sumber: Bapedalda Laporan ISPU 2007

Data ISPU untuk bulan Januari sampai dengan Agustus 2006 tidak ada karena perbaikan Alat PM-10. Dari tabel terlihat bahwa pada bulan Oktober 2006 terjadi penurunan kualitas udara sebesar 75,38% dari bulan sebelumnya, hal ini dikarenakan peningkatan konsentrasi debu (PM₁₀)

sebagai akibat dari pembakaran lahan dan aktifitas transportasi yang semakin padat. Untuk sementara waktu, pengukuran parameter lain seperti sulfur dioksida (SO₂), Oksida Nitrogen (NO_x), Nitrogen dioksida (NO₂), Hidrokarbon (HC), dan Karbon monoksida (CO), Timbal (Pb) belum dapat dilakukan karena keterbatasan peralatan.

Penurunan kualitas udara ini berdampak pada kesehatan masyarakat. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 4.3 berikut.

Tabel 4.3 Perkembangan 10 jenis penyakit terbesar di Kota Jambi

No.	Jenis Penyakit	Tahun 2004	%	Tahun 2005	%	Tahun 2006	%
1.	Infeksi akut lain Pernafasan Atas (ISPA)	122.807	31,0	108.292	34,2	97.271	35,35
2.	Penyakit Lain pada Saluran Pernafasan atas	50.319	12,7	51.458	16,2	53.115	19,31
3.	Penyakit pada otot dan Jaringan Pengikat	25.424	6,4	26.545	8,4	24.480	8,90
4.	Penyakit Kulit Infeksi	24.027	6,1	24.941	7,9	-	-
5.	Penyakit Kulit Alergi	21.075	5,3	23.171	7,3	-	-
6.	Penyakit Pulpa dan Jaringan Periapikal	21.514	5,4	20.847	6,6	20.435	7,42
7.	Gingivitis dan Periodental	20.378	5,2	23.646	7,5	21.811	7,9
8.	Penyakit Darah Tinggi	15.803	4,0	15.491	4,9	17.285	6,28
9.	Diare (termasuk tersangka kolera)	13.438	3,4	13.145	4,1	16.545	6,01
10.	Penyakit Infeksi usus yang lain	-	-	-	-	7.303	2,7
11.	Asma	-	-	-	-	8.890	3,2
12.	Gangguan Gigi dan Jaringan Penyangga	81.261	20,5	9.550	3,0	7.990	2,9

Tabel diatas menunjukkan bahwa Penyakit lain pada saluran pernapasan atas, Penyakit tekanan darah tinggi dan Diare terjadi peningkatan dari tahun 2005, masing-masing sebesar 19,31 %, 6,28 % dan 6,01 %.

BAB V

KEANEKARAGAMAN HAYATI



Keanekaragaman Hayati merupakan bagian dari komponen yang secara ekologis berperan sebagai penentu keseimbangan ekosistem yang penting bagi kehidupan, terutama dalam penyediaan kebutuhan keanekaan bahan hayati dan penyediaan jasa lainnya. Dengan demikian merupakan salah satu penopang utama kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia.

Keanekaragaman hayati adalah keadaan beragamnya ekosistem, jenis dan variabilitas genetika binatang, tumbuh-tumbuhan dan mikro organisme yang hidup. Setiap individu organisme mengandung ribuan gen dengan kombinasi yang unik, sementara jenis atau species terdiri dari banyak organisme. Ekosistem merupakan kumpulan dari banyak spesies yang berinteraksi satu sama lainnya dan dengan lingkungan fisik.

Atas dasar itu pelestarian keanekaragaman hayati menjadi penting demi termanfaatkannya keanekaragaman hayati secara benar dan berkelanjutan. Kenyataannya sekarang pelestarian keanekaragaman hayati masih belum terlaksana dengan baik, mengingat ancaman yang dihadapi sangat rumit dan sangat sulit diatasi. Ancaman yang dihadapi dalam pelestarian keanekaragaman hayati diantaranya adalah : pengaruh perubahan iklim, eksploitasi yang berlebihan atau kegiatan yang mengakibatkan kerusakan fisik penopang kehidupan, pencemaran, kehadiran spesies asing yang invasif, kegiatan pembudidayaan yang

tidak disertai upaya yang menjamin kelestarian berbagai varietas dari spesies yang dibudidayakan.

Untuk mendukung tercapainya pembangunan nasional secara berkelanjutan diharapkan para pengambil keputusan dan pihak terkait lainnya lebih meningkatkan upaya pemanfaatan keanekaragaman hayati secara lestari, pengembangan nilai manfaat pengelolaan konservasi dan meningkatkan kesadaran serta peran masyarakat.

Kebijakan pemerintah yang dijadikan panduan komprehensif dalam pengelolaan keanekaragaman hayati untuk mendukung tercapainya pembangunan berkelanjutan antara lain Undang-Undang No. 5 Tahun 1994 yang merupakan ratifikasi dan konvensi keanekaragaman hayati (KKH). Pengelolaan keanekaragaman hayati sesuai undang – undang ini diarahkan pada komitmen Indonesia untuk melaksanakan tiga tujuan pokok KKH, yaitu konservasi, pemanfaatan komponen keanekaragaman hayati secara berkelanjutan, dan pembagian keuntungan dari hasil pemanfaatannya secara adil, diharapkan dapat dilaksanakan oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, untuk mewujudkan dan memfasilitasi pelaksanaan tujuan dimaksud, pemerintah telah menyusun strategi dan rencana aksi keanekaragaman hayati nasional yang diharapkan menjadi acuan dalam pemanfaatan secara berkelanjutan oleh semua sektor dan pemangku kepentingan.

Salah satu kebijakan pengelolaan keanekaragaman hayati yang dilaksanakan pemerintah dalam rangka pencapaian tujuan KKH adalah konservasi in-situ dan konservasi eks-situ. Program konservasi in-situ diarahkan pada usaha terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistem melalui kegiatan perlindungan sistem penyanggah kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya tersebut melalui pencadangan kawasan yang telah ditentukan dan ditetapkan oleh pemerintah. Konservasi eks-situ merupakan konservasi komponen keanekaragaman hayati diluar habitat alaminya.

A. Kondisi Keanekaragaman Hayati

Rusaknya hutan dan lahan mengakibatkan keanekaragaman hayati terancam punah. Kerusakan itu juga mengakibatkan ekosistem baik didaratan maupun di sungai ikut rusak sampai dengan Oktober 2007, berdasarkan catatan Kantor Kehutanan Kota Jambi, luas dan jumlah kawasan konservasi yang ada di Kota Jambi hanya Hutan Kota seluas 75,77 Ha yang terbagi menjadi Hutan Kota di Kelurahan Kenali Asam Bawah 11,00 Ha, Hutan Pinus di KM 11 seluas 10,00 Ha dan Hutan Rengas Danau Buluran Kenali 54,77 Ha. Tabel 6.1 menunjukkan luas Hutan Kota Jambi sampai dengan Oktober 2007.

Tabel 5.1 Luas Hutan Kota Jambi Tahun 2007.

No.	Jenis Hutan	Jumlah (bh)	Luas (Ha)	Ket
1	Hutan Negara	-	-	
2	Hutan Hak			
3	Hutan Adat	-	-	
4	Hutan Produksi	-	-	
5	Hutan Lindung	-	-	
6	Hutan Konservasi	-	-	
7	Hutan Kota:			
	a. Hutan Kota di Kel.Kenali Asam Bawah	1	11,00	
	b. Hutan Pinus di KM. 11	1	10,00	
	c. Hutan Rengas (Danau Buluran Kenali)	1	54,77	
	Jumlah		75,77	

1. Lahan Basah

Data pasti mengenai jumlah luas, type maupun karakteristik lahan basah nasional secara keseluruhan belum ada. Data yang banyak dipublikasikan dan menjadi acuan saat ini umumnya berasal dari hasil kompilasi Wetlands International Indonesia Programme (WI-IP). Data tersebut hasil penggabungan

data dari berbagai sumber termasuk data yang dikumpulkan WIIP. Tidak dapat disangkal lagi lahan basah Indonesia banyak yang rusak dan luasnya berkurang dalam jumlah besar, walaupun sulit disajikan dalam angka karena terbatasnya data.

Pada Tabel 5.2 disajikan luasan beberapa ekosistem lahan basah di Indonesia yang dikutip dari beberapa sumber dan beberapa modifikasi. Data yang tercantum ini ketepatannya bersifat tidak mutlak. Setiap instansi mungkin saja mempunyai data yang berbeda tergantung dari metode pengukurannya.

Tab 5.2. Luasan beberapa ekosistem lahan basah di Indonesia.

No.	Tipe	Luas (ha)		
		Semula	Sisa	Dilindungi
1	Rawa Gambut	16.266.000	13.203.000	1.882.000
2	Rawa Air Tawar	11.544.000	5.185.500	984.250
3	Hutan Mangrove	9.248.038	5.326.870	3.720.187
4	Trumbu Karang	> 5.120.000	5.120.000	t.a.d
5	Padang Lamun	> 3.000.000	3.000.000	t.a.d
6	Vegetasi Pantai	180.000	78.000	33.000
7	Dataran Lumpur/Pasir	t.a.d	t.a.d	t.a.d
8	Danau	774.894	308.000	73.800
9	Estuary	t.a.d	t.a.d	t.a.d
10	Sungai	t.a.d	t.a.d	t.a.d
11	Kolam Air Tawar	155.216	80.995	-
12	Waduk/Bendungan	t.a.d	t.a.d	t.a.d
13	Sawah	8.393.290	7.787.339	-
14	Tambak Ikan/Udang	304.623	435.000	-
15	Tambak Garam	t.a.d	t.a.d	t.a.d
Jumlah		54.968.061	40.506.704	6.693.237

Sumber: Komite Nasional Pengelolaan Ekosistem Lahan Basah, 2005

Keterangan: t.a.d = tidak ada data

2. Keanekaragaman spesies dan genetik

Indonesia paling tidak memiliki lima mamalia besar yang terancam punah, yaitu: gajah sumatera, orangutan, badak sumatera, badak jawa dan harimau sumatera. Berikut ini informasi mengenai populasi ke lima mamalia besar tersebut.

Gajah

Gajah Sumatera (*Elephas maximus sumatrensis*) tersebar di hutan-hutan sumatera, didalam kawasan konservasi maupun diluar kawasan konservasi. Pada Tabel 5.3 dibawah ini menampilkan populasi gajah dikawasan ekosistem Leuser.

Tabel 5.3 Populasi Gajah di Kawasan Ekosistem Leuser

No.	Ekosistem Leuser dan sekitarnya	Perkiraan Jumlah
1.	Sungai Mas / Meureubo (W)	20
2.	Isag / Meurabo (E)	20
3.	Jambo Aye (W)	40
4.	Jambo Aye (E)	50
5.	Penaron	50
6.	Serbajadi	50
7.	Lesten	105
8.	Sekundur	> 100
9.	Bengkung	> 100
10.	Kluet	20
	T o t a l	> 555

Sumber: FFI, 2005

Orangutan

Orangutan masih ditemukan dalam populasi yang relatif baik di habitatnya di NAD khususnya di Ulu Masen dan beberapa lokasi lainnya seperti Geumpang, Tangse dan Hilir sungai Teonom begitu juga di daerah

Panggong, Krueng Sabee, dan Kabupaten Aceh Jaya juga masih ditemukan orangutan tahun 2005.

Harimau Sumatera.



Populasi harimau sumatera yang saat ini secara resmi diperkirakan hanya 500 individu masih berada jauh dibawah daya dukung habitat. Untuk mencegah kepunahan harimau secara total diperlukan upaya konservasi harimau sumatera secara utuh dan lengkap dengan memanfaatkan potensial habitat yang masih ada dan dibarengi dengan upaya mengatasi ancaman langsung harimau sumatera di habitat alamnya (Hasiholan, 2006).

Badak

Indonesia memiliki dua spesies badak, yaitu badak sumatera (*Dicerorhinus Sumatrensis*) dan badak jawa (*Rhinoceros Sondaicus*) belum pernah ada survey populasi menyeluruh, terutama untuk badak sumatera sehingga belum ada data resmi yang dipublikasikan.

3. Penemuan jenis baru flora dan fauna.

Selama tahun 2005 telah ditemukan berbagai jenis tumbuhan dan satwa di wilayah pegunungan Foya, Mamberamo, Papua. Dari hasil penelitian/survey tim flora menemukan 24 jenis palem-palemman (*palmae*), 5 jenis diantaranya spesies baru. Tim ini juga telah berhasil mengoleksi 550 jenis tumbuhan di luar

keluarga palem-paleman, 5 diantaranya spesies baru. Selain itu dari hasil survey para ahli berhasil mengidentifikasi beberapa satwa baru; penemuan kangguru pohon mantel emas (*Dendrolagus pulcherrimus*), penemuan katak mata jaring (*Nyctimystes fluviatilis*) dan katak *Xenorbina arboricola*, penemuan landak papua (*Zaglossus* sp) dan penemuan 215 spesies burung (burung pengisap madu dan burung mandur dahi mas serta dapat menkoleksi 270 spesies kupu – kupu yang bisa diidentifikasi ada 5 spesies baru.

4. Implementasi Convention On Biological Diversity (CBD)

Sebagai negara pihak yang meratifikasi Konvensi PBB mengenai Keanekaragaman Hayati atau dikenal dengan Convention on Biological Diversity (CBD), Indonesia memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan hasil keputusan-keputusan pada setiap Conference of the Parties (COP). Kewajiban tersebut meliputi implementasi keputusan COP dalam rangka pencapaian tujuan Konvensi Keanekaragaman Hayati (KKH) yaitu :

1. Konservasi keanekaragaman hayati.
2. Pemanfaatan yang lestari dari komponennya.
3. Pembagian euntungan yang adil atas pemanfaatan sumber daya genetik.

Implementasi dari KKH tersebut dilakukan melalui pendekatan multipihak dengan tanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing serta diharapkan akan menghasilkan berbagai berbagai macam aktifitas skala nasional, regional dan internasional, serta meningkatkan koordinasi antar sektor.

Untuk mewujudkan pelaksanaan Konvensi Keanekaragaman Hayati, KKH mewajibkan para pihak untuk membuat strategi dan rencana aksi nasional sebagai paduan untuk menetapkan prioritas dan investasi di bidang konservasi untuk jangka waktu yang lebih panjang dengan tujuan untuk memfasilitasi pelaksanaan upaya konservasi dan pemanfaatan secara lestari sesuai dengan tiga tujuan KKH.

Indonesia saat ini telah menyusun strategi dan rencana aksi nasional guna mengevaluasi pelaksanaan tujuan prioritas rencana aksi sebelumnya, mengidentifikasi kebutuhan dan aksi prioritas yang baru, menentukan peluang dan

kendala dalam pelaksanaan tujuan KKH dan menyusun strategi dan rencana aksi yang baru guna dapat memfasilitasi semua pihak dalam upaya pencapaian tiga tujuan KKH.

B. Ancaman Keanekaragaman Hayati

Ancaman yang paling utama dalam pelestarian ekosistem hutan adalah pemerosotan dan kerusakan ekosistem hutan akibat penebangan ilegal, fragmentasi, dan konservasi hutan untuk pemanfaatan lain.

Penyusutan dan kemerosotan lahan basah juga bisa mengancam keanekaragaman hayati dan ekosistem lahan basah. Penyusutan dan kemerosotan lahan basah, terutama sungai, danau dan rawa, akibat eksploitasi dan pemanfaatan sumber daya alam yang tidak seimbang, pencemaran, konversi habitat dan faktor alami seperti bencana alam.

1. Ancaman Tingkat Spesies dan Genetik.

Ketika pengetahuan mengenai tanaman obat masuk ke dunia industri, tidak bisa dihindari lagi terjadi eksploitasi tanaman obat dari hutan untuk jenis – jenis yang belum bisa dibudidayakan, hal ini mengakibatkan mulai berkurangnya jenis tanaman/spesies tertentu sedangkan pada sektor pertanian, khususnya tanaman hias, terlihat adanya kecenderungan pasar dunia mulai beralih pada tanaman tropis. Indonesia sebagai negara tropis mempunyai potensi besar untuk memenuhi pasar tersebut disamping itu potensi ikan hias dari Indonesia juga berhasil dibudidayakan oleh masyarakat, yang menjadi andalan untuk di ekspor. Meningkatnya jumlah pemanfaatan keanekaragaman hayati, dapat merangsang para kolektor untuk mengeksploitasi jenis spesies baru yang dianggap memiliki nilai estetika dan komersial tinggi.

2. Permasalahan Implementasi Konvensi Keanekaragaman Hayati (KKH).

Lemahnya pelaksanaan pada KKH antara lain disebabkan karena :

- a. sistem.

Aturan terkait dengan kebijakan, hukum dan kerangka peraturan serta pelaksanaan implementasi KKH perlu lebih ditingkatkan.

b. Institusi.

Perlu lebih ditingkatkan kembali mandat institusi dalam mengkoordinasikan pelaksanaan KKH termasuk juga didalam pertukaran data dan informasi keanekaragaman hayati.

c. Individu.

Perlunya peningkatan keahlian dan motivasi sumber daya manusia untuk pelaksanaan KKH.

C. Pengelolaan Dan Konservasi Keanekaragaman Hayati.

Hutan sebagai sumber daya hayati memberikan manfaat ekonomi melalui produksi kayu, perdagangan hasil hutan non kayu, buah-buahan, obat-obatan, binatang buruan dan bahan pangan. Pemanfaatan lain jasa lingkungan antara lain :

- Ekowisata. Saat ini ada 24 izin pemanfaatan pariwisata alam.
- Pemanfaatan air dalam kerangka perlindungan kawasan konservasi.
- Pemanfaatan jasa perlindungan keanekaragaman hayati seperti sumber plasma nutfah dan bio-prospecting.
- Pemanfaatan jasa konservasi untuk penghapusan hutang luar negeri.
- Pemanfaatan jasa reforestasi dan aforestasi dalam perdagangan karbon.
- Jasa konservasi sumber daya alam dan hutan untuk pencegahan deforestasi dan devegetasi (adaptasi perubahan iklim).
- Jasa evaluasi untuk pemasangan transmitter.

1. Pemanfaatan Ekosistem Lahan Basah.

Pemanfaatan ekosistem lahan basah dapat digunakan untuk :

- Pembangunan dan pengembangan pangkalan data mutakhir (pengembangan pangkalan data lahan basah dan pendataan lahan basah).
- Peningkatan peran serta masyarakat (pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat).
- Pengembangan kebijakan, hukum dan peningkatan pentaatannya (strategi dan rencana aksi keanekaragaman hayati Indonesia, strategi nasional pengelolaan ekosistem Mangrove, strategi nasional pengelolaan terumbu karang.
- Memperkuat kelembagaan (pembentukan wadah koordinasi nasional pengelolaan ekosistem lahan basa, pembentukan komite pengelolaan ekosistem lahan basah untuk tingkat daerah).
- Melaksanakan pendidikan dan peningkatan kepedulian mengenai lahan basah (pelatihan manajemen konservasi, pelatihan lahan basah).
- Meningkatkan kerjasama dengan jaringan Internasional (kerja sama internasional dan kerja sama regional).
- Membiayai pengelolaan lahan basah (pembiayaan dari sumber non pemerintah dan berbagai kerja sama pemerintah dan LSM dengan swasta).
- Memanfaatkan secara arif dan bijaksana melalui penelitian ilmiah yang menjamin keberlanjutan pemanfaatan ekosistem lahan basah.
- Melaksanakan pengelolaan kualitas air (penetapan klasifikasi mutu air, baku mutu air dan status mutu air sebagai langkah awal mencegah penurunan kualitas air dan mendorong peningkatan kualitas air pada setiap kawasan aliran sungai).
- Merestorasi dan merehabilitasi lahan basah (mengurangi tekanan kerusakan yang terjadi pada suatu kawasan).

- Melaksanakan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim (menurunkan laju emisi gas rumah kaca).

2. Pengelolaan Keanekaragaman Spesies dan Genetik.

Program konservasi Harimau Sumatera dalam melestarikan Harimau Sumatera diantaranya telah berupaya untuk melakukan dan memfasilitasi :

- a. Kegiatan penyelamatan kantong – kantong habitat Harimau Sumatera yang berada didalam kawasan konservasi dan diluar kawasan konservasi.
- b. kegiatan perlindungan Harimau Sumatera, satwa mangsa dan habitatnya.
- c. Penegakan hukum di bidang wildlife crime dengan melibatkan masyarakat.
- d. Penguatan institusi dan sumber daya manusia yang terkait dengan pelestarian Harimau Sumatera.
- e. Membuat protokol penanganan konflik antara harimau dengan masyarakat.

3. Konservasi dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Jenis Baru.

- a. Konservasi In Situ.

Indonesia merupakan negara tropis pertama di dunia yang mempunyai kawasan lindung yang berfungsi sebagai sarana konservasi in situ, yaitu upaya melindungi ekosistem atau habitat alami untuk konservasi keanekaragaman spesies dan genetik.

Taman nasional merupakan kawasan pelestarian alam in situ yang mempunyai fungsi untuk perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

- b. Konservasi Eks Situ.

Tujuan konservasi eks situ adalah untuk melestarikan flora dan fauna diluar habitat alaminya. Pelestarian keanekaragaman genetik terutama untuk tanaman pertanian dan ternak dilakukan melalui koleksi flasma nutfah di

beberapa balai penelitian di bawah Departemen Pertanian maupun departemen lainnya. Koleksi eks situ mengalami berbagai masalah antara lain kekurangan dana, fasilitas dan tenaga terlatih. Sebagai contoh berbagai balai atau pusat penelitian tidak mempunyai fasilitas penyimpanan jangka panjang sehingga koleksi harus sering direjuvenasi (ditanam atau ditangkar ulang). Anggaran penelitian untuk karakterisasi plasma nutfah juga relatif terbatas.

Ditengah keterbatasan dana dan fasilitas tersebut kita patut berbangga hati karena sebagian dari para peneliti masih bersemangat untuk melakukan penelitian dan membuat karya yang sangat mengagumkan yaitu dibangunnya taman lumut yang terbesar di dunia, dibentuknya lembaga – lembaga konservasi dan pembangunan kebun – kebun raya yang baru.

3. Pelaksanaan Konvensi Keanekaragaman Hayati.

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), sebagai bagian dari pelaksanaan KKH, telah menjalin kerjasama kemitraan lintas sektor maupun dengan lembaga swadaya masyarakat, di dalam negeri maupun luar negeri. Di dalam negeri KLH aktif menjadi anggota kelompok kerja yang dikoordinasi oleh pemerintah dan non-pemerintah.

Pemerintah Indonesia telah menandatangani kesepakatan bersama dengan tujuh organisasi non pemerinath untuk melaksanakan program kerja untuk kawasan lindung, salah satu kegiatannya adalah menyusun rencana pendanaan yang berkelanjutan untuk pengelolaan kawasan lindung. Penyusunan rencana pendanaan tersebut mencakup identifikasi sumber pendanaan dan mekanismenya, serta strategi untuk mengembangkan atau memanfaatkan sumber–sumber pendanaan yang ada untuk pengelolaan kawasan lindung.

Beberapa hasil dari kegiatan ini antara lain tersusun dokumen nasional mengenai sustainable financing plan on protected areas, terlaksananya donor meeting baik untuk tingkat nasional maupun international. Program Terrestrial Biodiversty at Bukit Tiga Puluh National Park 2002 – 2005 adalah salah satu kegiatan pada program pengelolaan lingkungan hidup kerjasama antara KLH

dengan kerajaan Norwegia. Program ini mencakup 4 kabupaten, yaitu Indragiri Hulu dan Indragiri Hilir di Propinsi Riau, Tanjung Jabung Barat dan Tebo di Propinsi Jambi.

Tujuan utama dari program ini adalah meningkatkan pemahaman dan kemampuan berbagai lembaga di daerah, baik pemerintah maupun non pemerintah, serta masyarakat disekitar taman nasional dalam perencanaan dan pengelolaan Taman Nasional Bukit Tigapuluh (TNBT) secara terpadu melalui pendekatan ekosistem (Franklin, N, 2004).

Pada tahun 2005 program ini telah menyusun Strategi dan Rencana Aksi Pengelolaan Terpadu Sumber Daya Alam di Bukit Tigapuluh dan kawasan penyangga, menyusun bahan – bahan informasi seperti artikel di media. Program jua telah menyusun informasi mengenai kegiatan program di situs Internet Balai Kliring KKH, membantu penggandaan film dokumenter tentang TNBT, menulis informasi mengenai pencegahan perusakan habitat orang utan di Taman Nasional Gunung Palung (TNGP), dan menurunkan laju perburuan harimau sumatera di Taman Nasional Kerinci Sebelast (TNKS) melalui penegakan hukum bagi pamburu harimau secara intensif serta menekan laju penebangan ilegal.

BAB VI

REKOMENDASI / TINDAK LANJUT



Dalam menghadapi realita permasalahan lingkungan yang ada, pemerintah perlu menetapkan kebijakan untuk mengatasi kerusakan lingkungan. Pemerintah tidak cukup sekedar mendeklarasikan '*Sustainable Development*' (pembangunan berkelanjutan) yang direkomendasi PBB melalui laporannya *Our Common Future* sejak 14 tahun lalu. Dalam jangka pendek, pemerintah perlu memberikan penyuluhan kepada masyarakat umum melalui berbagai jalur pendidikan informal seperti kegiatan keagamaan, perkumpulan profesi, PKK, Karang Taruna, atau penjelasan dan informasi melalui media cetak dan elektronik selain menciptakan lingkungan kondusif di masyarakat.

Strategi

1. Optimalisasi peranserta masyarakat dan penguatan kelembagaan adat dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara efektif.
2. Sinergisme aktifitas lintas sektor, lintas fungsi, lintas peran, interkoneksi dari semua stakeholders dalam skala lokal, regional, nasional dan global.
3. Optimalisasi sistem perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah secara terpadu dengan mengedepankan prinsip-prinsip konservasi dan preservasi sesuai asas-asas pembangunan berkelanjutan.

Internalisasi isu-isu dan tuntutan perkembangan global dengan mengedepankan potensi sumberdaya alam dan lingkungan hidup Kota Jambi.

5. Pemberdayaan perangkat hukum pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

Tindak lanjut dari berbagai isu lingkungan di Kota Jambi secara umum meliputi:

- Aspek perencanaan pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pertambangan dilakukan secara efisien dengan berbagai pendekatan, terutama melalui pendekatan partisipatif.
- Tersedianya sarana dan peralatan yang memadai dalam evaluasi dan monitoring pelaksanaan pengendalian lingkungan.
- Mengefektifkan jaringan kelembagaan serta meningkatnya peranserta masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.
- Peningkatan kualitas sumberdaya manusia pengelola sumberdaya alam dan lingkungan hidup melalui berbagai jenjang pendidikan formal maupun kursus-kursus serta pelatihan.
- Kerjasama kemitraan dengan semua stakeholders Perguruan Tinggi, LSM, Masyarakat Adat, dan Pemerintah.
- Peningkatan pengawasan kepatuhan dunia usaha dan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan dan sistem tata nilai masyarakat lokal yang berwawasan lingkungan.
- Mengkaji kembali terhadap kebijakan konservasi dan rehabilitasi sumberdaya alam secara proporsional.
- Pengendalian terhadap pengelolaan sumberdaya hutan dan sumberdaya air dengan pendekatan Daerah Aliran Sungai dalam rangka penataan ruang.
- Peningkatan pengawasan dan pengendalian pencemaran air, tanah, dan udara.

- Mensyaratkan pembangunan sarana prasarana dalam perencanaan pembangunan memiliki dokumen lingkungan baik dokumen Amdal maupun dokumen UKL dan UPL.

1. Rencana tindak lanjut mengatasi masalah banjir

Salah satu usaha Untuk mengatasi masalah banjir dan genangan air, Pemerintah Kota Jambi melalui Bapedalda kota Jambi telah membuat Master Plan Kota teduh dan merencanakan pembuatan Master Plan Drainase Kota (ternyata selama ini belum pernah ada). Dengan demikian, jika Master Plan Drainase tersebut telah dibuat dan ditindaklanjuti dengan pembangunan ataupun rehabilitasi konstruksi drainase tersebut dan pengelolaan dengan baik diharapkan akan dapat mengatasi genangan-genangan air dalam kota.

Dinas Tata Kota telah melakukan perbaikan drainase dengan membuka saluran-saluran air yang tertutup beton untuk melancarkan aliran air dan menghindari tumpukan-tumpukan sampah.

Selanjutnya, Pemerintah Kota Jambi terus melakukan kegiatan normalisasi aliran sungai dan anak sungai dalam Kota Jambi, serta telah merencanakan untuk melaksanakan revitalisasi anak sungai yaitu sungai asam dan juga merencanakan pengerukan lumpur danau.

2. Rencana tindak lanjut mengatasi masalah pencemaran air

Air merupakan suatu ekosistem, dan air sendiri merupakan bagian sistem hidrorologi, sehingga memiliki ciri keselarasan, keseimbangan, dan keterpaduan. Oleh karena itu maka pengelolaan air juga harus mempertimbangkan ciri keselarasan, keseimbangan, dan keterpaduan, sehingga diperlukan suatu rencana induk yang di musyawarahkan dan dimufakati diantara *stake holders*-nya.

Keberhasilan upaya pengendalian pencemaran air tidak hanya ditentukan oleh keberhasilan mengurangi masukan polutan ke dalam sumber air (berair atau kering), tetapi juga ditentukan oleh keberhasilan menjaga debit / kuantitas air pada sumber air. Kualitas dan kuantitas air ditentukan pula oleh pengelolaan pada daerah catchment-nya sesuai fungsinya (fungsi resapan /fungsi tandon/fungsi ekologis). Oleh karena itu

keterpaduan kebijakan tiap instansi dan Pemerintah Daerah (*political will*) merupakan landasan untuk penyusunan rencana induk “action plan”.

Pengujian kualitas air sungai dan danau yang ada di Kota Jambi terus dilakukan setiap bulan, ini adalah salah satu cara untuk mengontrol kualitas air sungai sebagai air baku untuk air minum.

Salah satunya menerapkan konsep sungai sebagai halaman depan (*Water Front City*), dimana sungai dipandang sebagai bagian lingkungan yang harus dipelihara, bukan halaman belakang yang dipandang sebagai tempat pembuangan. Tujuan dari kegiatan *Water-Front City* ini adalah meningkatnya fungsi lingkungan sungai, baik kualitas air maupun bantarnya agar berfungsi sebagaimana mestinya.

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan pengembangan konsep *Water-Front City* adalah :

- Tersedianya informasi yang dapat dipahami masyarakat
- Meningkatnya apresiasi dan kepedulian masyarakat kepada lingkungan sungai
- Terdapatnya kesamaan visi dari pihak yang berkepentingan terhadap sungai
- Terwujudnya kawasan permukiman yang berkonsep Water-Front City
- Meningkatnya kesadaran dan ketaatan hukum pada peraturan yang berkenaan dengan pengelolaan lingkungan sungai



3. Rencana tindak lanjut mengatasi masalah pencemaran udara

- a. Mengadakan lomba sekolah berwawasan lingkungan, bersih dan sehat dari TK, SD, SLTP dan SLTA se Kota Jambi.

Kegiatan ini bertujuan sebagai ajang untuk membuka wawasan, menanamkan kepedulian siswa terhadap pola hidup bersih, sehat dan berwawasan lingkungan.

- b. Melakukan uji emisi bagi kendaraan roda empat atau lebih untuk tahap awal, dan nantinya akan dilanjutkan dengan uji emisi bagi kendaraan

roda dua yang akan menjadi syarat memperpanjang surat tanda nomor kendaraan (STNK). Untuk itu pemerintah Kota Jambi perlu membuat Peraturan Daerah tentang Pengendalian Pencemaran Udara. Dimana bukti uji emisi itu nantinya harus disertakan sebagai syarat perpanjangan pembayaran pajak.

4. Rencana tindak lanjut mengatasi masalah Limbah

- a. Melakukan evaluasi terhadap kinerja CV. USB selaku pihak pengelolaan pengangkutan sampah dalam Kota Jambi.
- b. Menerapkan program *Recycle*, *Reduce* dan *Reuse*. Sebagai contoh yaitu melakukan pelatihan kepada masyarakat tentang pemanfaatan sampah organik yang diolah secara sederhana untuk kompos dan lain sebagainya.
- c. Meningkatkan sarana prasarana kebersihan, seperti menambah armada pengangkut sampah, menambah tong/bak sampah, dan lain sebagainya.
- d. Merehabilitasi dan memfungsikan kembali Instalasi Pengolahan Limbah dan Tinja di Kelurahan Talang Bakung.

DAFTAR PUSTAKA

- Bapedalda Kota Jambi (2006). Basisdata Lingkungan Hidup Daerah Kota Jambi Tahun 2006
- Bapedalda Kota Jambi (2006). Buku Profil Kota Jambi Tahun 2006.
- Bappeda Kota Jambi dan BPS Kota Jambi (2006). Kota Jambi Dalam Angka Tahun 2005.
- Budiharjo. E, dan Harjohubojo. S (1993). Kota Berwawasan Lingkungan. Alumni Bandung.
- Soeryani. M (1997). Pembangunan dan Lingkungan: Meniti gagasan dan pelaksanaan sustainable development, Jakarta: Institut Pendidikan dan Pengembangan Lingkungan.